

IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DALAM UPAYA PENANGANAN KAWASAN KUMUH

(Studi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri

Kecamatan Klojen Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

VIAN FRISCA AISYAHWATI

115030107111003



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

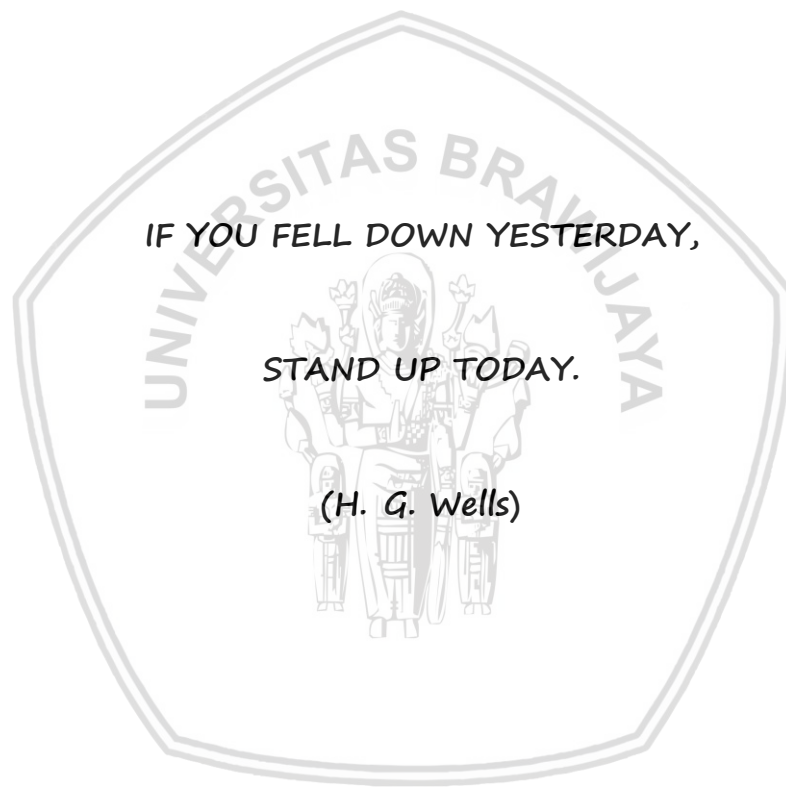
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam
Upaya Penanganan Kawasan Kumuh (Studi pada Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri
Kecamatan Klojen Kota Malang)

Disusun oleh : Vian Frisca Aisyahwati

NIM : 115030107111003

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Minat : Ilmu Administrasi Publik


Malang, 6 Juli 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002


Dr. rer. pol. Romy Hermawan,
S.Sos, M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juli 2018
Jam : 11.00 -12.00 WIB
Skripsi atas nama : Vian Frisca Aisyahwati
Judul : Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh (Studi pada Badan
Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri
Kecamatan Klojen Kota Malang)
Dan dinyatakan : **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota


Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002
Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

Anggota

Anggota


Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002
Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 19620401 198703 1 003

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan pada daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 6 Juli 2018



Vian Frisca Aisyahwati

NIM. 115030107111003

RINGKASAN

Vian Frisca Aisyahwati, 2018. **“Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh (Studi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)”**. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP, 150+ xv hal

Kualitas perumahan dan kondisi permukiman di Indonesia sampai saat ini masih menjadi *problematis* yang sering muncul. Permasalahan ini akibat dari kurangnya sistem perencanaan dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman, serta kepadatan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat mengakibatkan meningkatnya jumlah kawasan hunian di daerah perkotaan. Salah satu upaya strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR adalah strategi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Diantaranya dilakukan melalui program KOTAKU yang menggunakan sinergi pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program KOTAKU dalam upaya penanganan kawasan kumuh di BKM Gading Kasri beserta faktor penghambat implementasi program KOTAKU dalam upaya penanganan kawasan kumuh di BKM Gading Kasri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggunakan analisis data kualitatif model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program KOTAKU dalam upaya penanganan kawasan kumuh di BKM Gading Kasri telah terlaksana dengan baik. BKM sendiri sebagai pelaksana program telah melakukan penyusunan profil kumuh sesuai indikator kumuh program KOTAKU, dan melakukan penanganan kawasan kumuh dengan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi program KOTAKU di BKM Gading Kasri yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut mensukseskan program ini dengan cara menjaga lingkungan agar senantiasa layak huni dan terhindar dari kekumuhan, serta masih ada beberapa rumah yang belum ada IMB sehingga mengalami kesulitan dalam hal penataan bangunan.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah perlu adanya pendekatan yang lebih intens terhadap masyarakat tentang dampak buruk dari lingkungan kumuh. Serta perlu adanya *reward* bagi wilayah dengan kualitas lingkungan yang baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Kota Tanpa Kumuh, Penanganan Kawasan Kumuh*

SUMMARY

Vian Frisca Aisyahwati, 2018. **"Implementation of Kota Tanpa Kumuh's Program (KOTAKU) to Handling Slum Areas (Study on Agency Community Self-reliance Gadingkasri, Klojen, Malang)".** Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP, 150+ xv page

Today, the quality of housing and settlement conditions in Indonesia is still a problem. The phenomenon of population growth, lack of planning system and the declining quality of the settlement environment created an increasing number of residential areas in urban areas. Strategic of developing infrastructure based on society is one of the efforts of the Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KOTAKU Program which uses synergy approach between community-based infrastructure development was the result of the government policy.

This study aims to describe and analyze the implementation of KOTAKU Program in the effort of handling slum area in BKM Gading Kasri along with inhibiting factor of KOTAKU program implementation in effort of handling slum area in BKM Gading Kasri. The research method used is qualitative method with descriptive approach. With data collection techniques through interviews, observation, and documentation and using qualitative analysis of interactive model data (Miles, Huberman and Saldana, 2014).

Based on the results of research, the implementation of KOTAKU program in the effort of handling slum area in BKM Gading Kasri has been done well. BKM as the executor of the program has made the formation of slum profiles according to KOTAKU slum indicator, and handling slum areas with prevention strategies and improving environmental quality. There is an obstacle factor in the implementation of KOTAKU program in BKM Gading Kasri, lack of awareness of the community to participate in the success of this program by keeping the environment in order to always be habitable and avoid the slums, and still some houses that have no IMB so have difficulty in terms of building arrangement.

The recommendation of this research, need more intense approach to the community about the adverse impacts of slum environments, then rewarding for the region with good environmental quality to increase community participation in maintaining the environment can be the best option for improve the goal of this program.

Keywords: *Policy Implementation, Kota Tanpa Kumuh, Handling of Slum Areas*

KATA PENGANTAR

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh (Studi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang)**".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik.
4. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP selaku dosen Pembimbing II yang dengan sabar dan penuh perhatian sebagai sebagai seorang pendidik di tengah kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, memberikan motivasi, dan mengarahkan kepada penulis hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang tak ternilai harganya kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dewi Nurjanah sebagai Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. Bapak Didiet selaku fasilitator program KOTAKU di

- Kelurahan Gading Kasri dan Ibu Agustin yang telah membantu proses penelitian dengan memberikan informasi dan data.
7. Ayahku tercinta Bapak Fauji yang telah memberikan segala jerih payah dan tenaga untuk membesarkan dan membiayai keluarga hingga saat ini. Ibuku tersayang Ibu Liskanah yang tak pernah lelah mendoakan, membimbing, dan mendukungku hingga saat ini. Adik-adik ku Rofi' dan Aliya yang menjadi penyemangatku menyelesaikan skripsi ini.
 8. Sahabatku tercinta Marta Widyasmara, Ula Jamilatul, Yuricka Priskilia, Halimah W.H yang telah setia menemani saat kuliah, sempro, penelitian, dan segala situasi yang terjadi.
 9. Sahabat-sahabatku diluar FIA (Poppy, Vera, Nia, Citra, Echa, Aria Rahardi, Pandu Aji) yang telah membantu dalam segala proses, menjadi keluarga dan saling menyemangati untuk studi dan karir masing-masing.
 10. Fitria, Erry, Najela, Dian, Kartika, Elok, Yunita yang telah menemani dan berjuang bersama dalam segala situasi.
 11. Seluruh teman-teman angkatan 2011 jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah menjadi bagian dari proses studi saya.
 12. Semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga segala bantuan, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan beliau dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Tentu saja penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini.

Malang, 6 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR TABEL	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan	15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik	17
1. Pengertian Administrasi Publik	17
2. Pengertian Kebijakan Publik	19
B. Implementasi Kebijakan	21
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	21
2. Langkah-langkah dalam Implementasi Kebijakan	23
3. Model-model Implementasi Kebijakan Publik	24
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan	36
C. Permukiman Kumuh	40
1. Pengertian Permukiman	40
2. Pengertian Permukiman Kumuh	42

3.	Karakteristik Permukiman Kumuh	43
4.	Faktor Penyebab Permukiman Kumuh	44
5.	Pendekatan Upaya Penanganan Permukiman Kumuh	46
C.	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	47
1.	Pengertian Program	47
2.	Program Kota Tanpa Kumuh	48
3.	Tujuan Program KOTAKU.....	51
4.	Strategi Pelaksanaan Program KOTAKU	52
5.	Prinsip Program KOTAKU	54
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	57
B.	Fokus Penelitian	58
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	59
D.	Sumber Data	60
E.	Teknik Pengumpulan Data	61
F.	Instrumen Penelitian	63
G.	Validitas dan Reliabilitas Data	64
H.	Metode Analisis Data	66
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1.	Gambaran Umum Kota Malang	69
2.	Gambaran Umum Kelurahan Gading Kasri	73
3.	Gambaran Umum Badan Keswadayaan Masyarakat	74
B.	Penyajian Data dan Fokus Penelitian	77
1.	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang	77
a.	Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU	77
b.	Penyusunan profil permukiman kumuh kelurahan berdasarkan indikator kumuh Program KOTAKU	84

c. Konsep dan strategi yang digunakan dalam penanganan kawasan kumuh	101
2. Faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang	127
C. Analisis Data	131
1. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang	131
a. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU	132
b. Penyusunan profil permukiman kumuh kelurahan berdasarkan indikator kumuh Program KOTAKU	135
c. Konsep dan strategi yang digunakan dalam penanganan kawasan kumuh	141
1. Faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen Kota Malang	145
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	148
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn	25
Gambar 2.2 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier	27
Gambar 2.3 Model Goggin.....	28
Gambar 2.4 Model Grindle	31
Gambar 2.5 Model <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i>	33
Gambar 2.6 Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood	34
Gambar 3.1 <i>Components of Data Analysis: Interactive Model Miles & Huberman</i>	68
Gambar 4.1 Peta Kota Malang	71
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BKM Gading Kasri	76
Gambar 4.3 Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU.....	78
Gambar 4.4 Skema Penanganan Kawasan Kumuh	102
Gambar 4.5 Strategi Komunikasi Program KOTAKU	137

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Grafik Kepadatan Penduduk	87
Grafik 4.2	Kawasan Prioritas Penanganan Kumuh di Kelurahan Gading Kasri	98
Grafik 4.3	Perubahan Kawasan Prioritas Penanganan Kumuh di Kelurahan Gading Kasri	100



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi dan kepadatan penduduk kota malang menurut kecamatan tahun 2014	7
Tabel 1.2	Daftar penetapan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh Kota Malang	9
Tabel 4.1	Kondisi Kependudukan di Kelurahan	86
Tabel 4.2	Kepadatan Penduduk di Kawasan Perencanaan	86
Tabel 4.3	Sarana Fasilitas di Kelurahan	88
Tabel 4.4	Tata Guna Lahan	96
Tabel 4.5	Keteraturan dan Kepadatan Bangunan	96
Tabel 5.1	Kawasan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Gading Kasri	116
Tabel 5.2	Kegiatan Infrastruktur dan Sosial tahun 2014	117
Tabel 5.3	Kegiatan BLM kolaborasi	118
Tabel 5.4	Mengelola Dana Bantuan Investasi (BDI) National Slum Upgrading Program (NUSP)	118
Tabel 5.5	Kegiatan Program KOTAKU tahap 1	119
Tabel 5.6	Kegiatan Program KOTAKU tahap 2	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman pada saat ini, tantangan dan permasalahan yang dihadapi suatu negara semakin kompleks. Hal ini memaksa pemerintah untuk campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara tidak langsung untuk menyikapi banyaknya permasalahan yang ada saat ini, pemerintah harus memiliki pemikiran-pemikiran kreatif dan baru yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Masalah kesejahteraan masyarakat merupakan fenomena yang sering di bicarakan, akibat semakin kompleksnya permasalahan di daerah perkotaan. Permasalahan akibat pembangunan perkotaan yang semakin cepat dan laju urbanisasi yang meningkat, dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, tingkat kriminalitas yang tinggi dan permintaan jumlah perumahan atau kawasan hunian di daerah perkotaan semakin banyak. Tingginya kepadatan penduduk di perkotaan dengan tidak adanya dukungan kawasan permukiman yang luas mengakibatkan kawasan seperti sempadan sungai, rel kereta api atau zona lain, dimana yang secara peruntukan rencana tata ruang dan wilayah bukan merupakan wilayah permukiman menjadi terbentuknya kawasan permukiman baru.

Terbentuknya permukiman baru pada kawasan yang bukan daerah permukiman mengakibatkan terbentuknya kawasan permukiman liar. Hal ini jika tidak dapat ditangani secara serius dan cepat akan berimplikasi pada meluasnya

kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh pada dasarnya disebabkan oleh ketidakteraturan tata bangunan, dan kondisi bangunan perumahan yang tidak layak.

Permukiman kumuh dapat memberikan citra atau kesan kegagalan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat dan ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam mengatur pola tata ruang yang proporsional. Menurut Yunus (2005:91), “ada tiga penyebab terjadinya permukiman kumuh, yaitu pertama adalah proses densifikasi yang terus-menerus dan tidak terkontrol, kedua adalah proses penuaan bangunan (*ageing process*) dan ketiga adalah proses penggenangan daerah permukiman”.

Proses densifikasi secara terus menerus mengakibatkan kejenuhan pembangunan permukiman di wilayah wilayah tertentu, hal ini akan menyebabkan kurang tertatanya kawasan permukiman dan sulitnya pemenuhan prasarana dan sarana penunjang kawasan permukiman tersebut. Proses penuaan bangunan mengakibatkan kumuh diperkotaan akibat ketidaklayakan dan penurunan kualitas bangunan tempat tinggal. Hal ini bisa dilihat dari sudut pandang ekonomi, akibat perekonomian masyarakat rendah menyebabkan ketidakmampuan masyarakat tersebut untuk melakukan pemugaran atau pemeliharaan bangunan tempat tinggalnya tersebut. Sedangkan proses penggenangan berkaitan dengan ketersediaannya prasarana dan sarana drainase yang memadai, jika permukiman penduduk semakin berdempetan akan mengurangi akses jalan, sarana air bersih dan sarana drainase untuk menampung kelebihan air akibat kegiatan masyarakat atau mengatisipasi banjir ketika hujan.

Kualitas perumahan dan permukiman yang buruk di daerah perkotaan diakibatkan semakin terhimpitnya area permukiman masyarakat karena bertambahnya jumlah penduduk. Fenomena ini didukung dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan di daerah perkotaan yang menjadi daya tarik hingga banyaknya masyarakat yang berpindah dari desa ke kota (urbanisasi).

Kualitas perumahan dan kondisi permukiman di Indonesia sampai saat ini masih menjadi *problematis* yang sering muncul. Permasalahan ini akibat dari kurangnya sistem perencanaan dan menurunnya kualitas lingkungan permukiman, serta sistem kelembagaan penyedia sarana dan prasarana permukiman yang belum memadai, dimana secara fungsional seharusnya pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik, sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan tentang permukiman kumuh yaitu “Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak dikarenakan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak layak atau memenuhi syarat”. Munculnya permukiman kumuh (*slums area*) di bagian dalam

kota merupakan konsekuensi spasial karena adanya kepadatan bangunan di daerah permukiman yang tidak terkontrol. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

- 1) Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman
- 2) Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi
- 3) Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan Lingkungan
 - b. Drainase Lingkungan
 - c. Penyediaan Air Bersih/Minum
 - d. Pengelolaan Persampahan
 - e. Pengelolaan Air Limbah
 - f. Pengamanan Kebakaran
 - g. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

Kondisi rumah dilihat dari beberapa indikator seperti persentase rumah permanen dalam suatu zona permukiman, kepadatan penduduk, proporsi jumlah rumah tangga dalam satu rumah hunian, sampah, saluran dan pembuangan limbah. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan dilihat di beberapa indikator seperti sarana air bersih, sanitasi, akses jalan, fasilitas umum, sarana ekonomi dan

ketersediaan ruang terbuka hijau. Kriteria kerentanan status penduduk dilihat dari indikator kesehatan dan lingkungan, kesejahteraan keluarga, dan masalah sosial dan keamanan. Sedangkan kriteria pada faktor pendukung yaitu tingkat kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan permukiman dalam suatu zona maka akan menyebabkan zona tersebut terlibat kumuh.

Kumuh selain mengandung pengertian tidak layak yang juga dapat berarti ketidakteraturan, ketidaksehatan, ketidaktertiban pembangunan dan keselamatan. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum pada Februari 2015 di Indonesia tercatat luas kawasan kumuh adalah 38.481 Ha atau sebesar 12%. Dengan rincian 4.108 kawasan permukiman kumuh diperkotaan, kawasan permukiman kumuh terdapat 390 Kabupaten/Kota, dan hanya 231 Kabupaten/Kota yang memiliki SK Kumuh.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019, adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat. Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan Program

Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku). Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, Penguatan Peran Pemda sebagai Nahkoda dan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota. Melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Dalam penanganan kawasan permukiman kumuh sebagaimana bentuk realisasi program pemerintah pusat yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 dalam realisasi program 100-0-100 yaitu 100% akses air minum, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Realisasi 0% kumuh salah satunya adalah dengan dibentuknya Program Kota Tanpa Kumuh. Program Kota Tanpa Kumuh atau lebih sering disebut Program KOTAKU adalah program dari pemerintah pusat yang dikhususnya bagi daerah-daerah yang memiliki wilayah kumuh dan berpotensi sebagai daerah rawan kumuh.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015-2019, sebagai upaya pencapaian target RPJMN 2015-2019 dalam mencapai 0 Ha kawasan kumuh. Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program pemberdayaan masyarakat nasional sebelumnya. Program tersebut telah memberikan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem

monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dirancang dengan Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan dan Kolaborasi sebagai *Platform* serta masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh.

Berdasarkan Pedoman Teknis Program KOTAKU 2015, Program Kota Tanpa Kumuh adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 Kota/Kabupaten di 34 Provinsi yang menjadi *Platform* atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, Kota/Kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan dan pariwisata di Indonesia, memiliki pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat cepat baik dalam pertumbuhan fisik maupun ekonomi. Hal tersebut tentu saja menarik para pendatang sebagai kaum urban untuk mengadu nasib dalam mencari nafkah di Kota Malang yang menyebabkan semakin padatnya jumlah penduduk di Kota Malang.

Tabel 1.1 Distribusi dan kepadatan penduduk kota malang menurut kecamatan tahun 2014

kecamatan	Luas wilayah area (km ²)	Penduduk (orang)	persentase	Kepadatan penduduk (penduduk/km ²)
Kedungkandang	39,89	183,927	21,74	4,611
Sukun	20,97	188,545	22,29	8,991
Klojen	8,83	104,590	12,36	11,845
Blimbing	17,77	176,845	20,90	9,957
Lowokwaru	22,60	192,066	22,70	8,498
Jumlah	110,06	845,973	100,00	7,686

Sumber : Kota Malang dalam Angka 2015

Kepadatan penduduk Kota Malang pada tahun 2014 terjadi di Kecamatan Klojen dengan kepadatan penduduk sebesar 11.845 jiwa/Km². Kepadatan penduduk ini jika tidak diantisipasi akan menyebabkan permasalahan di Kota Malang semakin kompleks. Permasalahan yang paling mendasar adalah ketersediaan ruang untuk lahan permukiman masyarakat. Jika lahan permukiman semakin berkurang maka akan menyebabkan pembentukan lahan permukiman baru yang segera legal maupun ilegal. Gejala yang muncul lainnya adalah adanya kepadatan bangunan perumahan di beberapa zona permukiman. Apabila persoalan ini terus menerus terjadi dan tidak di kontrol, maka akan menyebabkan kurang tertatanya kawasan permukiman serta sulitnya pemenuhan sarana dan prasarana kawasan permukiman.

Keberadaan permukiman kumuh tidak dapat dilepaskan dari berbagai perkembangan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, baik dari tingkat lokal, nasional dan regional. Selain itu, peran serta seluruh *stakeholder* baik pemerintah,

swasta dan masyarakat sangat di harapkan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pengawasan permukiman, khususnya permukiman kumuh. Sughandy (dalam Khrisnanta,2010:4).

Dalam proses realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh, pemerintah Kota Malang membuat Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Malang dengan memuat jumlah kawasan permukiman kumuh ditiap kelurahan. Adapun daftar permukiman kumuh berdasarkan kelurahan di Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Daftar Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Malang

No	Lokasi	Luas (Ha)
1	Kelurahan Balearjosari	2,27
2	Kelurahan Blimbing	0,25
3	Kelurahan Pandanwangi	0,17
4	Kelurahan Purwantoro	0,05
5	Kelurahan Polehan	17,50
6	Kelurahan Jodipan	4,80
7	Kelurahan Kotalama	25,70
8	Kelurahan Mergosono	47,20
9	Kelurahan Samaan	30,40
10	Kelurahan Penanggungan	53,01
11	Kelurahan Oro-Oro Dowo	22,40
12	Kelurahan Gadingkasri	42,62
13	Kelurahan Bareng	81,56
14	Kelurahan Kauman	3,10
15	Kelurahan Kiduldalem	26,02

16	Kelurahan Kasin	48,20
17	Kelurahan Sukoharjo	39,20
18	Kelurahan Dinoyo	0,66
19	Kelurahan Tlogomas	2,54
20	Kelurahan Merjosari	0,05
21	Kelurahan Jatimulyo	0,40
22	Kelurahan Tulusrejo	8,00
23	Kelurahan Sumbersari	10,20
24	Kelurahan Lowokwaru	9,50
25	Kelurahan Ciptomulyo	62,60
26	Kelurahan Bandungrejosari	8,40
27	Kelurahan Sukun	34,35
28	Kelurahan Tanjungrejo	8,40
29	Kelurahan Bandulan	27,00

Sumber : SK Walikota Malang No. 86 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Kelurahan yang telah direalisasikan program Kota Tanpa Kumuh salah satunya adalah Kelurahan Gadingkasri. Berdasarkan SK Kumuh Walikota Malang, Kelurahan Gadingkasri memiliki luas kumuh seluas 42,62 Ha. Luas Kawasan Kumuh di kelurahan Gadingkasri ini diakibatkan oleh kepadatan penduduk yang sangat tinggi karena lokasi yang berdekatan dengan pusat kota. Selain itu juga disebabkan pada masalah penyediaan air bersih, saluran drainase, pengelolaan persampahan, jalan lingkungan dan pengelolaan air limbah.

Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan Program KOTAKU. Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai baseline survey yang menjadi pondasi perencanaan kegiatan. Masyarakat melalui BKM yang dimotori oleh Tim Inti Perencanaan Partisipatif

(TIPP), diharapkan menyelesaikan profil kumuh, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat Kota/Kabupaten. BKM Gadingkasri sebagai satu-satunya organisasi di Kelurahan Gadingkasri yang menangani pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh.

Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Perubahan peran BKM ini dari kondisi awal, dimana BKM berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, hanya mengelola dana BLM, menyusun PJM pronangkis dan melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi berorientasi kepada penanganan kumuh. Program KOTAKU diterjemahkan ke dalam 2 kegiatan, yaitu peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan permukiman kumuh yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Untuk mewujudkan tujuan program maka pemerintah kelurahan Gading Kasri bersama-sama dengan BKM Gading Kasri bersinergi dan berkolaborasi untuk merumuskan penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) untuk menghasilkan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman di Kelurahan Gading Kasri.

BKM bersama masyarakat merumuskan sistem dan strategi penyelesaian masalah pembangunan yang ada di Kelurahan Gading Kasri dalam upaya membangun infrastruktur permukiman yang berskala lingkungan, dan menjaga kualitas permukiman yang didukung oleh perubahan perilaku masyarakat. Namun pada pelaksanaannya masih rendah tingkat partisipasi masyarakat, dan masih

banyak masyarakat yang bergantung dari bantuan pemerintah sehingga kurang kesadaran untuk memperbaiki lingkungannya sendiri.

Perubahan mindset masyarakat menjadi salah satu hal penting, budaya kumuh dan kebiasaan melemparkan tanggungjawab pembangunan infrastruktur permukiman kepada pemerintah perlu untuk dirubah, berapapun anggaran yang dikeluarkan untuk membangun permukiman kumuh tidak akan ada artinya bila tidak didukung oleh kesadaran dan kepedulian masyarakat itu sendiri. Melalui program KOTAKU masyarakat diharapkan bisa merencanakan sendiri kebutuhan dalam rangka penanganan kawasan kumuh di wilayahnya sebagai basis program. Ketika masyarakat mampu merencanakan kebutuhan pembangunan di wilayahnya diharapkan masyarakat akan merasa memiliki program yang dalam pelaksanaannya menuntut partisipasi aktif dari masyarakat. Kebersamaan, kepedulian dan keterlibatan masyarakat diharapkan nantinya bisa merubah budaya kumuh yang ada di masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis inovasi program serta upaya yang dilakukan melalui penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang?
2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri
Kecamatan Klojen Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai analisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan secara khusus kepada peneliti dan secara umum kepada para pembaca.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, referensi dan kajian lebih lanjut tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, serta bermanfaat untuk dapat mengetahui langkah-langkah yang diambil

Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gadingkasri
Kecamatan Klojen Kota Malang.

c. Diharapkan dapat membuka wawasan dan pengetahuan tentang upaya Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang yang pada hakekatnya bermanfaat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar sesuatu yang dibahas pada masing-masing bab dalam skripsi ini dapat mudah diketahui dan dipahami secara jelas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan dijadikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu kesatuan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka, bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang berhubungan dengan tema penelitian, sehingga dengan pedoman pada landasan teori tersebut maka permasalahan yang ada akan dipecahkan dengan baik dan benar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, di antaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan diakhiri dengan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

Pada setiap negara memerlukan administrasi publik untuk melakukan kegiatan dibidang melayani masyarakat. Pada setiap negara juga melakukan kegiatan administrasi publik dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan karakteristik cara kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan. Kegiatan administrasi publik dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk dan dipilih seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif serta para pelaksana yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti di kecamatan dan kelurahan.

1. Pengertian Administrasi Publik

Kata “publik” mempunyai dimensi arti yang agak banyak, secara sosiologis kita tidak boleh menyamakannya dengan masyarakat. Perbedaan pengertiannya adalah masyarakat diartikan sebagai “sistem antar hubungan sosial di mana manusia hidup dan tinggal secara bersama-sama”. Di dalam masyarakat tersebut terdapat norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang mengikat atau membatasi kehidupan anggota-anggotanya. Di lain pihak kata “publik” diartikan sebagai “kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Tidak ada norma atau nilai yang mengikat/membatasi perilaku publik sebagaimana halnya pada masyarakat, karena publik itu sulit dikenali sifat-sifat kepribadiannya

(identifikasinya) secara jelas. Satu hal yang menonjol adalah mereka mempunyai perhatian atau minat yang sama”.

Banyak juga pendapat para ahli yang memberika definisi pada administrasi, seperti J.M Pfiffner dalam Islamy (2003: 1) menurutnya *“Administration may be defined as the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends”* (Administrasi dapat diartikan sebagai pengorganisasian dan pengerahan sumber-sumber manusia dan material untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan). H.A. Simon (1958) juga berpendapat *“Administration as the activities of group cooperating to accomplish common goals”* (Administrasi adalah merupakan aktivitas kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama).

Kata Administration dalam bahasa Inggris berasal dari kata *ad* + *ministrare* dalam bahasa Latin yang mempunyai arti *“to serve”* atau memberikan jasa, pelayanan, bantuan, melayani atau mengabdikan. Karakteristik utama administrasi adalah memberikan pelayanan dan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Public Administration adalah merupakan bentuk ‘aksi’ dari pemerintahan, atau merupakan alat/sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Menurut S.K. Balley dalam Islamy (2003: 15) Administrasi Publik seyogyanya mengembangkan 4 (empat) macam teori yaitu:

1. *Teori Deskriptif* : Teori yang bertujuan untuk mendeskripsikan struktur hierarkhis dan hubungan-hubungannya dengan lingkungan berbagai tugas-tugasnya.

2. *Teori Normatif* : Teori yang menjelaskan mengenai ‘tujuan nilai’ yang seyogyanya dicapai.
3. *Teori Asumtif* : Teori yang mampu memberikan pemahaman yang benar dan ketat atas siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ‘*person administratif*’.
4. *Teori Instrumental* : Teori yang mampu senantiasa terus-menerus melakukan penyempurnaan atas teknik manajerial yang bertujuan untuk meningkatkan tujuan publik secara efektif dan efisien.

Dengan keempat teori tersebut N. Henry menjelaskan adanya 3 pilar administrasi publik, yaitu: (1) perilaku organisasi dan perilaku orang-orang yang terdapat dalam organisasi; (2) teknologi manajemen dan institusi-institusi implementasi kebijakan; dan (3) kepentingan publik yang terkait dengan pilihan etis setiap individu dan masalah-masalah publik.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Lembaga dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut: “kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program

mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana” (United Nation, 1975).

Pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich, saat ia menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Apa yang dikemukakan oleh Friedrich tadi akan semakin jelas jika kita pertegas lagi dengan pendapat Knoepfel dan kawan-kawan (2007) saat mereka mengartikan kebijakan sebagai:

“a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one” (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintahan maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasikan, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).

Definisi lain, yang tak kalah luasnya, dikemukakan oleh Wilson dalam Wahab (2014: 13) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“the actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang

diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Pakar Inggris, W.I. Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

“A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Berdasarkan berbagai definisi tentang kebijakan publik dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua pembuatan kebijakan publik (*public policy making*) itu akan selalu melibatkan pemerintah, dengan cara tertentu. Dalam arti lain kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang ada pada masyarakat dalam satu lingkup negara. Sedangkan kebijakan publik memiliki 4 tahap dalam pelaksanaannya yaitu: planning, formulasi, implementasi, dan evaluasi.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses dari pelaksanaan suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2008:432). Implementasi kebijakan publik tidak hanya berkolerasi dengan mekanisme operasional kebijakan kedalam prosedur-prosedur birokrasi, akan tetapi juga sangat terkait dengan masalah konflik pengambilan suatu keputusan serta

bagaimana kebijakan tersebut mampu diperoleh oleh kelompok sasaran. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:139) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berkaitan dengan ini Mazmanian dan Sabatier menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan sebagai berikut: Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang menyangkut baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. (Wahab, 1997 h.65)

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan diatas sebenarnya dapat disimpulkan bahwa proses implementasi tidak hanya menyangkut kinerja badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (unintended negative effect).

Nugroho (2014:657) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Disebutkan bahwa terdapat dua pilihan langkah yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan yaitu langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program yang ada, dan mengimplementasikan melalui formulasi kebijakan *derivate*, atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

2. Langkah-langkah dalam Implementasi Kebijakan

Soenarko (2005) menyebutkan bahwa terdapat tiga kegiatan pokok penting untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a. *Interpretation*

Dalam implementasi kebijakan, *interpretation* dimaksudkan sebagai usaha yang dilakukan untuk membuat pelaksana kebijakan mengerti maksud dari pembuat kebijakan dan untuk mengetahui apa dan bagaimana hal tersebut diwujudkan. Dalam kegiatan *interpretation* pelaksana kebijakan perlu memposisikan diri sebagai pembuat kebijakan agar supaya dapat memahami kehendak dari pembuat kebijakan.

b. *Organization*

Dalam implementasi kebijakan, *organization* dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode yang dibutuhkan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Seluruh kegiatan dalam sistem dikerjakan dengan pembagian tugas dan kewajiban secara efisien sehingga efisiensi dari pelaksanaan kebijakan dapat dicapai.

c. *Application*

Dalam implementasi kebijakan, *application* merupakan penerapan dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai. Bergman dalam Soenarko (2005) menyebutkan bahwa “*programmed implementation* merupakan pelaksanaan kegiatan dalam *application* yang dilakukan secara runtun dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam program”. Kebalikan dari *programmed implementation* yaitu *adaptive implementation*.

Bergman dalam Soenarko (2005) menjelaskan bahwa *adaptive implementation* merupakan “pelaksanaan kegiatan dalam *application* yang memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat yang dikenakan kebijakan pada saat itu sehingga mengakibatkan adanya modifikasi dari kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

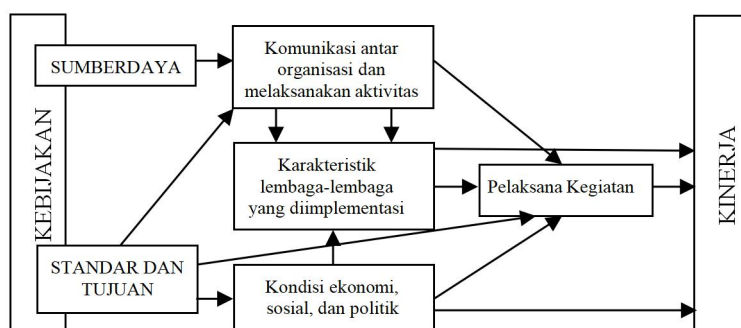
Berikut beberapa model implementasi kebijakan publik yaitu :

a. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini dikemukakan oleh Donald Van meter dan Carl Van Horn pada tahun 1975. Model ini mengibaratkan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik (Nugroho, 2009:503). Disebutkan bahwa beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu:

- 1) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- 2) Karakteristik agen pelaksana
- 3) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- 4) Kecenderungan (disposition) pelaksana

Kelebihan dari model ini adalah mempertimbangkan faktor eksternal dan lingkungan dalam mengimplementasikan kebijakan, formulasi kebijakan memiliki standar yang baik dan kongkrit, serta adanya hubungan yang baik antar organisasi pelaksana implementasi. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah proses implementasi membutuhkan waktu yang lama, target sasaran dari implementasi masih abstrak, serta dituntutnya loyalitas yang tinggi dari para aktor pelaksana.



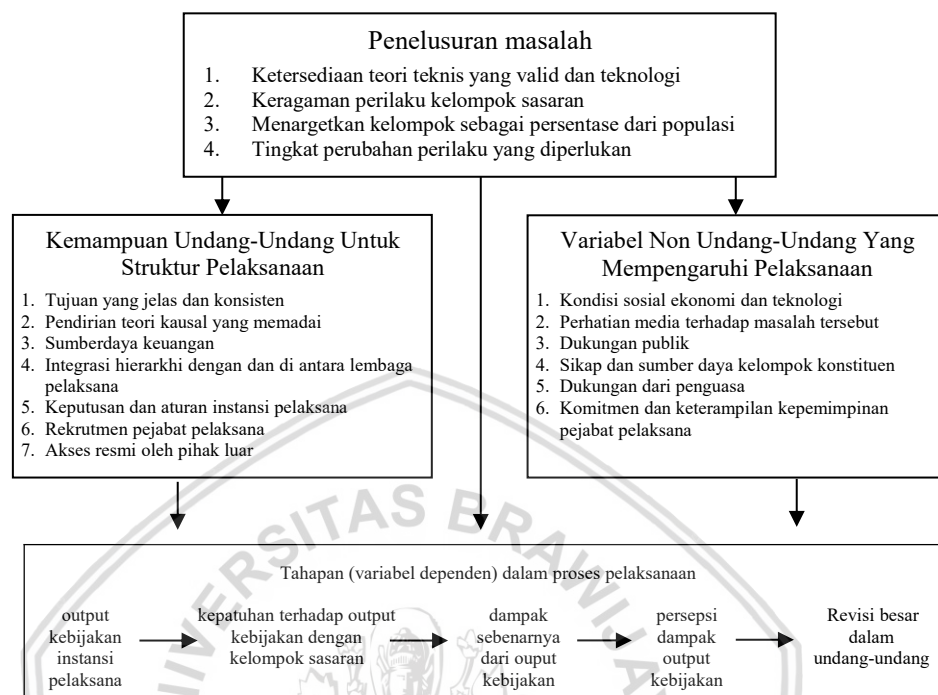
Gambar 2.1: Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn
Sumber: Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2009,504)

b. Model Mazmanian dan Sebatier

Model ini dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier tahun 1983. Model ini disebut sebagai model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang mengklasifikasikan proses kebijakan ke dalam tiga variabel yaitu (Nugroho, 2009:505):

- 1) Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan mengenai indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- 2) Variabel intervening, adalah variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsisten tujuan, dengan dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkhis antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- 3) Variabel dependen, adalah tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan bermuara pada perbaikan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan ataupun kebijakan yang bersifat mendasar.

Kelebihan dari model ini adalah adanya rasa tanggung jawab bagi semua aktor yang terlibat dalam implementasi, dukungan politik yang kuat, serta kesesuaian dengan prosedur aturan. Kekurangan dari model ini adalah tidak ada kontrol/ pengawasan terhadap proses implementasi kebijakan, proses implementasi kebijakan memakan waktu yang lama, tidak adanya partisipasi masyarakat.



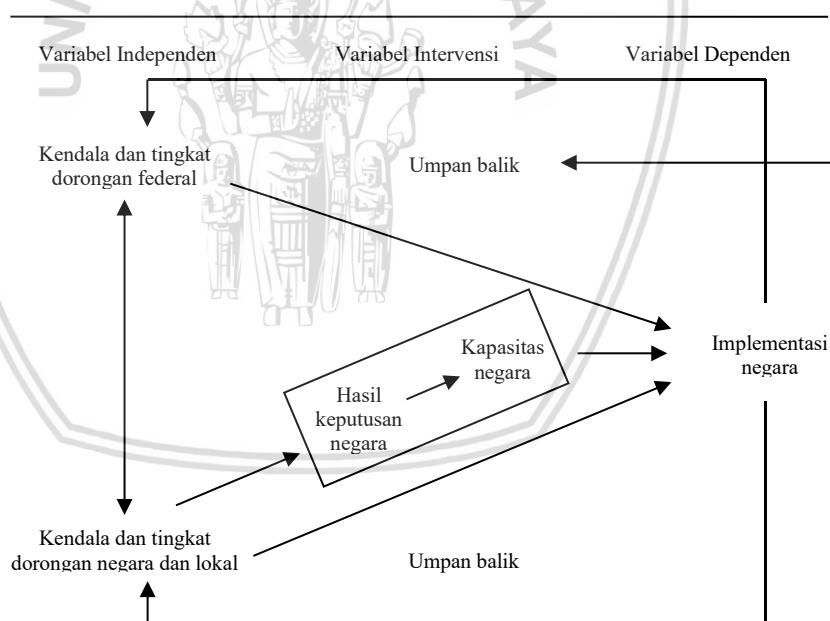
Gambar 2.2: Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Sumber: Mazmanian & Sabatier dalam Nugroho, (2014,667)

c. Model Goggin

Model ini dikemukakan oleh Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester. Model ini mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “*communication model*” untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan” (1990). Tujuannya adalah mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor “komunikasi”

sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan (Nugroho,2014:670).

Dalam model ini penekanan penggunaan komunikasi sangat penting peranannya dalam proses implementasi baik dengan pendekatan bottom-up ataupun top-down. Model ini lebih menekankan pada penggunaan metode top-down dimana seluruh tujuan dari implementasi lebih bersifat terpusat. Kekurangan dari model ini adalah gagal dalam menjelaskan hubungan antar aktor dalam proses implementasi dan institusi. Model ini juga gagal dalam menjelaskan isu penting dari komunikasi.



Gambar 2.3. Model Goggin

Sumber: Goggin, Bowman, dan Lester dalam Nugroho (2014:671)

d. Model Grindle

Model ini dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tahun 1980. Model ini ditentukan oleh *isi kebijakan* dan *konteks implementasinya*. Ide

dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan (*Content of Policy*) mencakup (Nugroho, 2014, 671) :

a. *Interest Affected* (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor

c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin

d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Misalnya, ketika BKKBN memiliki program peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memberikan bantuan dana kepada keluarga prasejahtera, banyak orang menanyakan apakah letak program ini sudah tepat berada di BKKBN

e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

f. *Resources Committed* (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)
Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) mencakup :

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

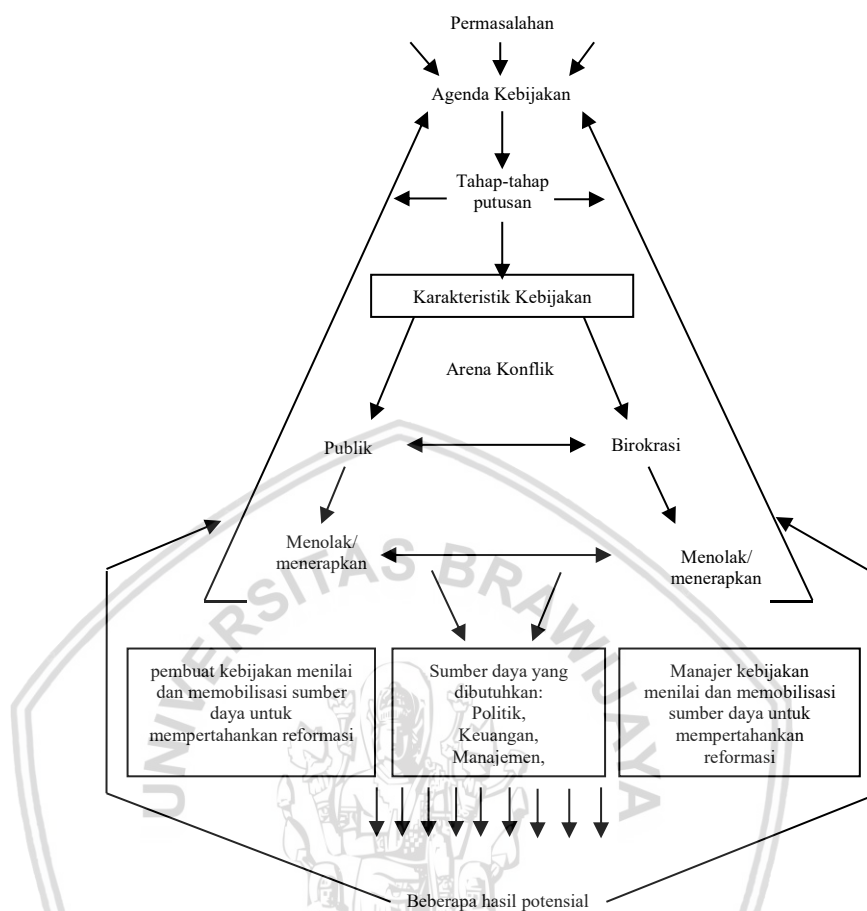
b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakanjuga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness* (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pada model ini kelebihan yang dimiliki yaitu pelaksanaan proses implementasi sangat dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai sehingga pelaksanaannya menjadi terfokus. Sedangkan kekurangan yang dimiliki yaitu adanya pengaruh kekuasaan, kepentingan, dan pengaruh dari aktor yang terlibat menyebabkan implementasi kebijakan lebih banyak bernuansa politik.



Gambar 2.4. Model Grindle
Sumber: Grindle dalam Nugroho (2014:672)

e. Model Edward III

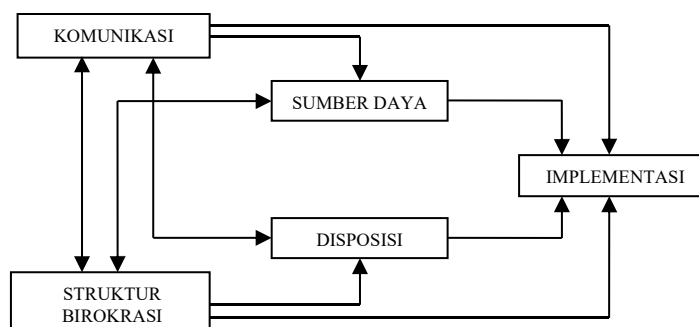
Model ini diprakarsai oleh George Edward III tahun 1980. Model ini melihat implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu (Nugroho, 2009:512) :

- 1) *Communication* (komunikasi) berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik,

sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Informasi disampaikan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

- 2) *Resources* (sumberdaya) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan untuk *carry-out* kebijakan secara efektif. “Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135)
- 3) *Disposition* (disposisi) berkenaan dengan *kesediaan* dari para implementor untuk *carry out* kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan (Widodo, 2007, 98)
- 4) *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi) berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Kelebihan dari model ini adalah komunikasi yang berjalan dengan baik antara atasan dan bawahan, adanya konsistensi pelaksanaan kebijakan karena komunikasi yang baik, struktur birokrasi yang mendukung, koordinasi yang baik.



Gambar 2.5. Model *Direct and Indirect Impact on Implementation* (George Edward III)
Sumber: Widodo (2007:107)

f. Model Nakamura dan Smallwood

Model Nakamura dan Smallwood menggambarkan proses implementasi kebijakan dengan secara detail, sehingga model ini relatif relevan diimplementasikan pada semua bentuk kebijakan (Nugroho, 2009,513). Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi yang disebut sebagai *environments influencing implementation* yang terdiri dari tiga elemen dengan masing-masing terdapat *actors and arenas*.

Model ini menekankan hubungan dan distribusi dari tanggungjawab dan gagasan diantara aktor kebijakan. Model ini menjelaskan lima perbedaan hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Tiap kriteria evaluasi lebih mungkin berkaitan pada hubungan atau skenario spesifik. Misalnya apabila kita menggunakan teknokrasi klasik maka peran dari pembuat kebijakan yaitu merumuskan tujuan spesifik dan membagi wewenang teknis padapelaksana kebijakan. Peran dari pelaksana kebijakan yaitu

mendukung tujuan dari pembuat kebijakan dan alat yang dibutuhkan untuk mencapainya, sedangkan peran dari penilai (evaluator) yaitu untuk mengukur hasil dan efisiensi dari tujuan. Penggunaan skenario menunjukkan ada sesuatu di luar individu yang memaksa kita untuk melihat pola hubungan dan pembagian tanggungjawab yang mungkin mempengaruhi implementasi bahwa banyak nilai berkaitan dengan kejelasan tujuan kebijakan. Mereka berpikir tujuan kebijakan yang jelas adalah dasar untuk pelaksanaan yang efektif. Bahkan untuk analisis kebijakan membutuhkan tujuan kebijakan yang jelas. Model ini memberikan definisi yang luas dari kesuksesan. Tetapi tidak memiliki variabel spesifik untuk fokus pada penyelidikan sistematis serta tidak ditentukannya lingkungan dan faktor-faktor kontekstual yang dapat mengarahkan pada satu dari lima skenario.

Tabel di bawah ini menjelaskan keterkaitan antara pembentukan kebijakan dan implementasi kebijakan secara praktikal.

Tabel 2.6 Model Implementasi Kebijakan Nakamura dan Smallwood

<i>Policy makers: Environment I— Policy Formation (Pembuat Kebijakan: Lingkungan I—Formulasi Kebijakan</i>	<i>Policy Implementers: Environment I— Policy Implementation (Pelaksana kebijakan: Lingkungan I—Implementasi kebijakan)</i>	<i>Potential Breakdowns (Potensi Kerusakan)</i>
1. Classical' Technocracy (Teknokrasi Klasik)		
<i>a. Policy makers formulate specific goals. (Para pembuat kebijakan merumuskan tujuan spesifik)</i> <i>b. Policy makers delegate technical authority to implementers to achieve goals. (Para pembuat kebijakan mendelegasikan wewenang teknis untuk pelaksana untuk mencapai tujuan)</i>	<i>a. Implementers support policy makers goal and devise technical means to achieve these goals. (pelaksana mendukung tujuan pembuat kebijakan dan menyusun sarana teknis untuk mencapai tujuan tersebut)</i>	<i>a. Technical failures of means. (Kegagalan teknis dari sarana)</i>
2. Instructed Delegation (Delegasi diinstruksikan)		

<p>a. <i>Policy makers formulate specific goals.</i> . (Para pembuat kebijakan merumuskan tujuan spesifik)</p> <p>b. <i>Policy makers delegate administrative authority to implementers to devise the means to achieve goals.</i> (para pembuat kebijakan mendelegasikan kewenangan administratif kepada pelaksana untuk merancang cara untuk mencapai tujuan)</p>	<p>a. <i>Implementers support policy makers goal and negotiate administrative means among themselves to achieve goals.</i> (pelaksana mendukung tujuan pembuat kebijakan dan bernegosiasi cara administratif antara mereka sendiri untuk mencapai tujuan)</p>	<p>a. <i>Technical failure of means.</i> (Kegagalan teknis dari sarana)</p> <p>b. <i>Negotiation failures (complexity, stalemate).</i> (kegagalan negosiasi, (kompleksitas, kebuntuan)</p>
<p>a. <i>Policy makers formulate specific goals.</i> (Para pembuat kebijakan merumuskan tujuan spesifik)</p> <p>b. <i>Policy makers delegate administrative authority to implementers to devise the means to achieve goals.</i> (para pembuat kebijakan mendelegasikan kewenangan administratif kepada pelaksana untuk merancang cara untuk mencapai tujuan)</p>	<p>a. <i>Implementers bargain with policy makers over goals and/ or means to achieve goals.</i> (pelaksana melakukan persetujuan dengan pembuat kebijakan atas tujuan dan/atau sarana untuk mencapai tujuan)</p>	<p>a. <i>Technical failure of means.</i> (Kegagalan teknis dari sarana)</p> <p>b. <i>Bargaining failures (stalemate, non implementation).</i> (kegagalan perundingan (jalan buntu, non pelaksanaan))</p> <p>c. <i>Cooptation or "cheating".</i> (kooptasi atau "kecurangan")</p>
<p>3. Discretionary Experimentation (kebebasan untuk menentukan percobaan)</p>		
<p>a. <i>Policy makers support abstract (undefined) goals.</i> (pembuat kebijakan mendukung abstrak (tidak terdefinisi) tujuan)</p> <p>b. <i>Policy makers delegate broad discretionary authority to implementers to refine goals and means.</i> (para pembuat kebijakan mendelegasikan kewenangan diskresioner luas untuk pelaksana untuk memperbaiki tujuan dan sarana)</p>	<p>a. <i>Implementers refine goals and means for policy makers.</i> (pelaksana memperbaiki tujuan dan berarti bagi para pembuat kebijakan)</p>	<p>a. <i>Technical failure of means.</i> (Kegagalan teknis dari sarana)</p> <p>b. <i>Ambiguity</i> (ambiguitas)</p> <p>c. <i>Cooptation</i> (pemilihan)</p> <p>d. <i>Unaccountability</i> (tidak bertanggungjawab)</p>
<p>c. Bureaucratic Entrepreneurship (Birokasi kewiraswastaan)</p>		
<p>a. <i>Policy makers support goals and means formulated by implementers.</i> (Para pembuat kebijakan mendukung tujuan dan berarti dirumuskan oleh pelaksana)</p>	<p>a. <i>Implementers formulate policy goals and means to carry out goals and persuade policy makers to accept their goals.</i> (Pelaksana merumuskan tujuan kebijakan dan sarana untuk melaksanakan tujuan dan membujuk para pembuat kebijakan untuk menerima tujuan mereka)</p>	<p>a. <i>Technical failure of means.</i> (kegagalan teknis dari sarana)</p> <p>b. <i>Cooptation.</i> (Pemilihan)</p> <p>c. <i>Unaccountability.</i> (tidak bertanggungjawab)</p> <p>d. <i>Policy preemption.</i> (kebijakan hak membeli terlebih dulu)</p>

Sumber: Nugroho (2014:676)

Model implementasi kebijakan yang diambil oleh peneliti adalah model Grindle, karena model ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
- b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Dalam hal ini, Grindle lebih menekankan pentingnya penentuan tujuan kebijakan yang bersifat *bottom up* yaitu yang mengandung makna bahwa inisiatif tujuan berasal dari penerima manfaat, bisa masukan, kritik, atau harapan masyarakat. Hal ini karena dalam rumusan implementasi kebijakan sebagai sebuah proses politik dan administratif yang dibuat bukanlah sebuah proses yang linear dan berhenti di terciptanya *outcomes*. Akan tetapi, terjadi proses yang berkesinambungan yang mensyaratkan penentuan kebijakan haruslah memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya.

4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

- 1) Respeknya Anggota Masyarakat terhadap Otoritas dan Keputusan keputusan Pemerintah.

Sebenarnya kita telah terdidik untuk secara moral untuk mematuhi hukum/undang-undang sebagai hal yang benar dan tepat. Sehingga menurut Anderson dalam Islamy (2007, h. 108) menyatakan apabila kita merasa bersalah, maka kita akan malu pada diri kita. Rasa malu inilah yang menyadarkan kita untuk mau menerima kebijakan tersebut. Ketika warga menghormati pemerintah yang berkuasa dikarenakan legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut pula memenuhi ajakan pemerintah undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, keputusan pemerintah. Oleh karena itu ketika masyarakat mulai menghormati keputusan keputusan yang dibuat pemerintah, maka masyarakat tersebut akan turut melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah.

2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.

Seringkali banyak orang melaksanakan kebijakan publik sebagaimana sesuatu yang logis, rasional dan adil. Sehingga menurut Islamy (200, h.109) disaat seseorang sadar akan pentingnya sebuah pelaksanaan kebijakan, maka iya akan sadar dan patuh dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

3) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat pejabat pemerintah yang berwenang untuk melalui prosedur yang benar.

Apabila suatu kebijakan negara dibuat berdasarkan ketentuan yang telah berlaku maka menurut pendapat Islamy (200, h.109) masyarakat cenderung untuk mempunyai kesediaan diri untuk menerima kebijakan tersebut.

4) Adanya hukuman-hukuman tertentu bila tidak melaksanakan kebijakan.

Dengan adanya hukuman tertentu yang bersifat memaksa, maka menurut Islamy (2007, h.109) orang-orang akan mematuhi kebijakan, karena ia takut akan terkena hukuman, misalnya denda, kurungan, dan sanksi-sanksi lain. Karena itu salah satu strategi dalam upaya untuk memenuhi pelaksanaan implementasi kebijakan adalah dengan cara menghindarkan sanksi hokum yang berat pada setiap orang yang melanggarnya.

5) Adanya kepentingan pribadi.

Kepentingan pribadi ini mengacuh pada seseorang atau sekelompok orang yang sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu proyek implementasi kebijakan, maka dari itu menurut Islamy (2007,

- h. 109) mereka dengan senang hati akan menerima kebijakan, mendukung, maupun melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.

5. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor lain adalah faktor yang menyebabkan suatu pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat. Penilaian pelaksanaan kebijakan yang kerap kali dianggap gagal bukan saja dilihat dari segi pelaksanaan saja, melainkan juga dilihat dari segi tujuan yang terkadang didalam kebijakan tersebut haruslah tercapai, pendapat Adrerson dikutip Islamy (2007, h.110-112) menyatakan bahwa seseorang enggan untuk mengimplementasikan kebijakan dikarenakan oleh sebab-sebab sebagai berikut.

1. Adanya ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

Sikap ketidakpatuhan selektif ini merupakan penjelasan Islamy (2007, h. 110) dikarenakan ada beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang kurang meningkat pada individu-individu. Seseorang terkadang patuh pada suatu aturan, namun di sisi lain seseorang terkadang tidak patuh pada aturan.

Ketidakpatuhan Selektif terhadap hukum yang berlaku. Bisa jadi karna menganggap bentuk output kebijakan yang diberikan masi perlu dilakukan perubahan-perubahan, dengan kata lain ounput kebijakan yang diberikan, dianggap masi perlu adanya perbaikan/revisi, sehingga pelaksanaanya tidak dapat dipaksakan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penolakan pelaksanaan kebijakan.

2. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi

Apabila seseorang terlibat ke dalam suatu organisasi tertentu, dan tujuan organisasinya bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat, maka menurut Islamy (2007, h. 121) mereka cenderung untuk tidak patuh terhadap kebijakan yang dibuat.

3. Keingin untuk mencari untung dengan cepat.

Adanya keinginan mencari untung dengan cepat, menurut penjelasan Islamy (2007, h. 121) sering kali menyebabkan orang berupaya dengan cara menipu atau melawan hukum. Bila terdapat dua perusahaan memiliki kesempatan mencari untung yang sama yang satu karena perusahaannya akan bangrut dan tidak menguntungkan, maka perusahaan ini cenderung melawan hukum.

4. Adanya ketidak pastian hokum

Adanya ketidak pastian hukum, ketidak jelasan ukuran kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain, dan sebagaimana menurut penjelasan Islamy (2001, h. 121) hal tersebut dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum dan kebijakan negara.

Sesuai dengan penjelasan Islamy (2007, h. 117) ynag menjelaskan bahwa tidak tercapainya pelaksana kebijakan saja, hanya karena faktor-faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk melaksanakan kebijakan, akan tetapi menurut islamy (2007, h. 117) juga terdapat pula faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan, sehingga ketika tujuan tidak tercapai maka dapat dianggap tidak berhasilnya pelaksana kebijakan, hal- hal ini berpengaruh diantaranya:

1. Karena tersedianya sumber-sumber terbatas baik tenaga, biaya, waktu, dan sebagainya, sehingga dampak yang diharapkan tidak tercapai tetapi sebaliknya.
2. Karena kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan akan dapat mengurangi tercapainya dampak-dampak kebijakan, karena baik dalam isinya kebijakan kalau tidak diimplementasikan akan sulit tercapainya.

3. Seringkali sejumlah problem-problem publik timbul karena adanya berbagai macam faktor, sedangkan kebijakan seringkali hanya atas salah satu dan sejumlah kecil faktor-faktor tersebut.
4. Adanya usaha-usaha tertentu yang memakan biaya yang lebih besar dari masalah-masalah sendiri.
5. Adanya masalah-masalah baru lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang, dari masalah-masalah yang ada.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi seluruh masyarakat. Namun tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara dalam hal ini masyarakat mematuhi dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan juga akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. Kebijakan yang dibuat pemerintah juga tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada pada lingkungannya. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, maka suatu kebijakan publik tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, maka suatu kebijakan publik tidak akan efektif.

C. Permukiman Kumuh

1. Pengertian Permukiman

Permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu areal atau wilayah beserta prasarana yang ada di dalamnya. Bentuk permukiman dapat berupa kelompok rumah, kampung, atau wilayah

permukiman yang luas. Penataan permukiman dapat dibedakan menjadi dua objek penataan, yaitu penataan permukiman lama dan penataan permukiman baru. Penataan permukiman lama dilakukan terhadap objek yang sudah terbangun, sedangkan penataan permukiman baru dilakukan terhadap objek yang akan dibangun (Sadyohutomo, 2008:134).

Permasalahan utama pada permukiman lama yang perlu ditata adalah adanya permukiman kumuh (*slums*). Permukiman kumuh menunjukkan keadaan permukiman padat yang tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana dan utilitas yang memadai, terutama jalan dan saluran pembuangan air limbah (Sadyohutomo, 2008:134). Lebih lanjut, Sadyohutomo menyatakan bahwa permasalahan yang terdapat dalam program penataan permukiman lama yang kumuh adalah bahwa ruang gerak pelaksanaannya dibatasi oleh kondisi fisik tata bangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam beberapa pemikiran, permukiman dan perumahan merupakan hal yang berbeda, namun memiliki hubungan yang erat. Kurniasih (2007) menyatakan bahwa:

“Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu *house* dan *land settlement*. Permukiman memberikan kesan tentang permukiman atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan, sehingga permukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati, yaitu manusia (*human*). Dengan demikian, perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakikatnya saling melengkapi.”

Dengan demikian, permukiman merupakan sebuah kawasan dimana sekelompok orang membangun dan bertempat tinggal di kawasan tersebut. Adanya permukiman mencerminkan bagaimana sekelompok masyarakat menjalani interaksi-interaksi dengan kelompok sosial lainnya dan lingkungannya.

2 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Sulestianson, 2014).

Sementara itu, Komarudin (1997) dalam Kurniawan (2011) mengatakan bahwa “Permukiman kumuh adalah permukiman yang berpenghuni padat, kondisi sosial ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukuran di bawah standar, prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, dibangun di atas tanah Negara atau milik orang lain, dan di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, Kurniawan (2011) menyimpulkan yaitu berdasar pada pengertian permukiman kumuh menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Permukiman adalah tempat bermukim

- b. Permukiman kumuh merupakan suatu permukiman yang tidak memenuhi standar hunian yang layak dengan kondisi sosial ekonomi rendah, dan prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.
- c. Penanganan permukiman kumuh adalah suatu pengaturan dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya dalam mengatasi masalah permukiman kumuh.
- d. Penataan permukiman kumuh adalah suatu pengaturan atau pembangunan khususnya dalam bidang fisik atau infrastruktur dalam mengatasi masalah permukiman kumuh.

Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan permukiman yang kompleks. Permasalahan permukiman kumuh tidak hanya pada lingkungannya, namun hal-hal seperti mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat merupakan aspek yang penting untuk dilakukan agar dampak positif yang diharapkan seperti kesadaran dan kepedulian masyarakat dapat diwujudkan. Dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh menjadi target Nasional.

3. Karakteristik Permukiman Kumuh

Surbakti dalam Dinas Pekerjaan Umum (2009) sebagaimana dikutip Kurniawan (2011) menyatakan bahwa karakteristik permukiman kumuh sebagai berikut.

- a. Permukiman tersebut dihuni oleh penduduk yang padat, karena adanya pertumbuhan penduduk alamiah maupun migrasi yang tinggi dari pedesaan.

- b. Permukiman tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah atau memproduksi subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- c. Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam kategori rumah darurat (*substandard housing conditions*), yaitu bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bamboo, kayu, alang-alang dan bahan yang cepat hancur lainnya.
- d. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah.
- e. Langkanya pelayanan kota (*urban services*), seperti air minum, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), listrik, sistem pembuangan kotoran dan sampah, serta perlindungan kebakaran.
- f. Pertumbuhannya tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan terurus (dalam hal bangunan, halaman, dan jalan-jalan), serta sempitnya ruang antar bangunan dan tidak ada ruang terbuka sama sekali.
- g. Secara sosial terisolasi dari permukiman masyarakat lainnya.
- h. Permukiman kumuh pada umumnya berlokasi di sekitar pusat kota dan seringkali tidak jelas pula status hukum tanah yang ditempatinya (*squatter*).

Dengan merujuk beberapa karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa sebagian besar permukiman kumuh dapat terjadi karena sarana-prasarana dan infrastruktur yang ada di permukiman kurang memadai dan kurang layak. Selain itu, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah juga ikut berperan penting dalam tercapainya sebuah permukiman kumuh.

4. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh

Sadyohutomo (2008) menyatakan bahwa faktor penyebab munculnya permukiman kumuh yaitu sebagai berikut.

- a. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi, tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan yang cukup.

Pertumbuhan penduduk kota terdiri dari dua sumber. Pertama, karena migrasi masuk. Migrasi desa-kota di Negara berkembang berlangsung dengan tingkat yang cukup tinggi dan dengan tingkat keahlian sumber daya manusia yang rendah. Dikarenakan tingkat keahliannya rendah dan tingkat upah yang rendah.

- b. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi berarti pertumbuhan alami penduduk di kota juga masih cukup tinggi.

Hal ini disebabkan mayoritas penduduk di perkotaan, terutama yang berasal dari migrasi masuk merupakan penduduk pada usia subur. Pertumbuhan penduduk alami menimbulkan peningkatan kepadatan hunian rumah dan kepadatan bangunan rumah.

- c. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat secara swadaya memecah-mecah bidang tanah dan membangun permukiman mereka tanpa didasari perencanaan tepat (*site plan*) yang memadai.

Apabila melihat faktor-faktor di atas, maka hal yang dapat disimpulkan adalah faktor bagaimana kepadatan penduduk sangat mempengaruhi kondisi suatu permukiman. Selain pola pikir dan perilaku masyarakat, perpindahan penduduk (*migrasi*) yang tidak terkendali dapat memperparah suatu permukiman dengan adanya bangunan-bangunan rumah ilegal dan tidak layak, hal ini sering terjadi terutama pada wilayah permukiman di perkotaan.

5. Pendekatan Upaya Penanganan Permukiman Kumuh

Dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh terdapat 3 pendekatan (Setijanti dalam Butar, 2012), yakni:

- 1) Pendekatan partisipatori, yang mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang memfokuskan pada permintaan lokal, perubahan perilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaannya.
- 2) Pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan menaruh perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan penyiapan dan pemberdayaan usaha ekonomi dan komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan.
- 3) Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang, pendekatan ini pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral. Bentuk-bentuk penanganan dengan pendekatan aspek keruangan dibedakan menjadi 2 bagian, yakni:
 - a. Redefiasi merupakan penanganan permukiman dengan melakukan intervensi program permukiman tanpa merubah struktur ruang yang telah ada dan berjalan, yang terdiri dari kegiatan, seperti:
 - a) Revitalisasi
 - b) Rehabilitasi

- b. Restrukturisasi merupakan suatu proses menstruktur kembali pola ruang atau struktur ruang yang telah ada, meliputi:
 - a) Renewal
 - b) Redevelopment
 - c) Restorasi

D. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

1. Pengertian Program

Program menurut Arikunto (1998:1) menyatakan sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu program merupakan kegiatan yang di rencanakan dan memiliki tujuan tertentu sehingga pencapaian keberhasilan tersebut juga dapat diukur. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan kumpulan dari kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mengarahkan kepada suatu tujuan tertentu dan dapat dinilai tingkat keberhasilan pencapaian kegiatan dalam bentuk program tersebut.

Menurut Arikunto (1998:10) menjelaskan bahwa tujuan penelitian program adalah mengukur keberhasilan program. Penilaian program juga berfungsi sebagai pembantu, pengontrol pelaksana program agar dapat diketahui tindak lanjut dari pelaksana tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian program dilakukan untuk menilai suatu keberhasilan program mencapai tujuannya dan menghasilkan pengambilan keputusan. Menurut Arikunto (1998:7) pengambilan keputusan tersebut akan memunculkan empat (4) kemungkinan, yaitu:

- a. Dilanjutkan dan disebarkan program tersebut karena berdampak positif bagi program yang bersangkutan dan diperkirakan akan berdampak sama apabila diterapkan pada program lain.
- b. Dilanjutkan tetapi hanya pada program tersebut, apabila ingin dilanjutkan kepada program lain diperlukan persyaratan khusus.
- c. Dilanjutkan hanya pada program yang bersangkutan dan memerlukan perubahan, penambahan, atau penyempurnaan.
- d. Dihentikan karena hasil penilaian program tersebut berdampak negatif atau tidak memiliki dampak yang signifikan bagi program tersebut maupun program lain.

Dalam hal ini, rancangan program Kota Tanpa Kumuh berpijak pada pengembangan dari program pemberdayaan masyarakat nasional sebelumnya. Program ini diharapkan dapat menyempurnakan program-program yang sebelumnya dan dapat mewujudkan permukiman layak huni yang berkelanjutan. Sesuai dengan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

2. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Program Kota Tanpa Kumuh adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai

tempat hunian. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. Keteraturan bangunan
 - b. Jalan Lingkungan
 - c. Drainase Lingkungan
 - d. Penyediaan Air Bersih/Minum
 - e. Pengelolaan Persampahan
 - f. Pengelolaan Air Limbah
 - g. Pengamanan Kebakaran, dan
 - h. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

3. Tujuan Program KOTAKU

Tujuan program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk

mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan yang harus dicapai antara lain sebagai berikut:

1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha.
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik.
3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator *outcome* “ sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap insfratraktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan.

- 2) Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik.
- 3) Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung program KOTAKU.
- 4) Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh. (Pedoman Umum Program KOTAKU, hal 4-5)

4. Strategi Pelaksanaan Program KOTAKU

Strategi pendamping Kotaku meliputi; penyusunan Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh perkotaan, keterpaduan penanganan permukiman kumuh perkotaan kementerian PUPR di 30 Kabupaten/Kota lokasi prioritas keterpaduan, program penangan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi BKM dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh (KOTAKU).

Perubahan peran BKM ini dari kondisi awal, dimana BKM berorientasi pada penanggulangan kemiskinan, hanya mengelola dana BLM, menyusun PJM pronangkis dan melaksanakan kegiatan infrastruktur, sosial dan ekonomi menjadi berorientasi kepada penanganan kumuh, menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

membangun infrastruktur permukiman yang berskala lingkungan, dan menjaga kualitas permukiman yang didukung oleh perubahan perilaku masyarakat.

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas kumuh.
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring, penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat.
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor.
4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya.
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.
6. Meningkatkan akses, terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota, mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan.
7. Advokasi kepastian, bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci.
8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

Pemberdayaan melalui program KOTAKU yang diberikan oleh pemerintah berupa pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, untuk

itu masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, masyarakat di libatkan secara aktif dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta sampai pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan. (Pedoman Umum Program KOTAKU, hal 5-6)

5. Prinsip Program KOTAKU

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

1) Pemerintah daerah sebagai Nahkoda

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintah serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

2) Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program)

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional.

3) Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot hingga pemerintah desa dan kecamatan.

4) Partisipatif

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.

5) Kreatif dan Inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.

6) Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan

program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan

pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

7) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)

Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*)

8) Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

9) Revitalisasi peran BKM, penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan metode studi yang dilakukan seseorang atau beberapa orang melalui penyelidikan yang hati-hati terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah yang diteliti. Dalam melaksanakan suatu penelitian, langkah-langkah yang akan di ambil bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta memperoleh informasi yang lengkap. Maka terlebih dahulu harus dipahami dasar-dasar yang menjadi tumpuan berpikir dalam menggunakan metode ilmiah, khususnya dalam rangka sistem etika penelitian. Dengan kata lain sebelumnya peneliti harus dapat memahami dasar pemikiran terhadap masalah yang akan diselidiki serta untuk memberikan gambaran dari masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif disini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 2003:63). Data yang dikumpulkan dengan jenis penelitian ini berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Maleong (2004:04) yaitu:

“Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Pendekatann ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perilaku memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan”.

Pendekatan kualitatif menekankan pada pendekatan humanistik untuk memahami realitis sosial, memberikan tekanan pada pandangan terbuka terhadap kehidupan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis secara terperinci tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang secara optimal.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*). Penentuan fokus sangat menentukan dalam langkah-langkah penelitian. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Masalah adalah keadaan yang membingungkan sebagai akibat adanya kaitan dua atau lebih.

Seperti yang dikemukakan Moleong (2004:94) bahwa penentuan fokus penelitian mempunyai dua tujuan, pertama, penentuan fokus membatasi studi dan yang kedua penentuan fokus penelitian secara efektif menetapkan criteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Adanya fokus penelitian bisa mempermudah penelitian dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Adapun fokus penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang.
 - a. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh
 - b. Penyusunan profil permukiman kumuh kelurahan berdasarkan indikator kumuh Program Kota Tanpa Kumuh
 - c. Konsep dan strategi yang digunakan dalam Penanganan Kawasan Kumuh
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti sebenarnya mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat, absah, yang benar-benar diperlukan dalam penelitian. Sedangkan situs penelitian yaitu obyek yang akan

digunakan untuk penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan penelitian adalah Kota Malang.

Situs penelitian itu sendiri menunjukkan dimana sebenarnya peneliti keadaan menangkap dari objek yang diteliti. Maka situs dari penelitian ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat yang beralamat di Jl. Simp. Gading No. 27 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang. Alasan penulis memilih situs ini sebagai tempat penelitian karena Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang ini telah menunjukkan kontribusi positif sebagai salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan dalam upaya menjadi motor gerakan solidaritas sosial di masyarakat kelurahan setempat. BKM juga dapat dipercaya baik oleh warga masyarakat setempat maupun pihak luar. Selain itu, penetapan situs penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap instansi dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data berasal dari subyek atau obyek yang memenuhi persyaratan tertentu yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Arikunto (1998:114), yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek darimana data itu dapat diperoleh. Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam proses penelitian karena akan mempermudah penulis dalam menyusun sebuah penelitian.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui dua sumber pengambilan data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung terhadap obyek yang diteliti dan dikumpulkan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan beberapa responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar lokasi obyek yang diteliti mencakup informasi yang telah dikumpulkan dan hanya relevan dengan permasalahan yang ada, terdiri dari dokumen-dokumen berupa foto pelaksanaan kegiatan program KOTAKU yang telah dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gadingkasri Kota Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2008), teknik pengumpulan data adalah langkah strategis untuk menyajikan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi.

Pengumpulan data dengan survey lapangan yang mengamati secara langsung kejadian-kejadian di lapangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode observasi sebagai alat pengumpul data dapat melihat dinamika dan gambaran perilaku warga dalam keadaan (*setting*) alamiah. Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan BKM Gading Kasri untuk penanganan kawasan kumuh melalui program KOTAKU yang menjadi situs penelitian. Selain itu, terdapat beberapa cara dan alat yang dipergunakan untuk mencatat data hasil observasi, yaitu:

a. Catatan anekdot (*anecdotal record*). Alat untuk mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa menurut urutan kejadian. Catatan dibuat segera setelah peristiwa terjadi. Pencatatan ini dilakukan terhadap bagaimana kejadiannya, bukan pendapat si peneliti tentang kejadian tersebut.

b. Catatan berkala (*incidental record*). Pencatatan berkala walaupun dilakukan berurutan menurut waktu munculnya suatu gejala, tidak dilakukan secara terus menerus, tetapi pada waktu tertentu dan juga terbatas pada jangka waktu yang ditetapkan untuk tiap-tiap kali pengamatan.

c. Daftar cek (*check list*). Penataan data dilakukan dengan mempergunakan sebuah daftar yang memuat nama observer disertai jenis gejala yang akan diamati. Tugas peneliti member tanda cek pada gejala yang muncul.

d. Peralatan teknis (*mechanical device*). Pencatatan data dengan alat ini tidak dilakukan saat observasi berlangsung karena seluruh atau sebagian peristiwa direkam dengan alat seperti film dan foto.

2. Wawancara (*interview*).

Teknik pengumpulan data berbentuk interaksi verbal antara peneliti dengan responden dan digunakan untuk mengetahui hal-hal secara mendalam dari responden. Terdapat empat variable yang dapat memengaruhi hasil wawancara yakni pewawancara, responden, materi wawancara, dan hubungan antara pewawancara dengan responden. Untuk memperoleh

informasi yang tepat dan objektif, setiap pewawancara harus mampu menciptakan *raport*. *Raport* adalah situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan pikiran serta member informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Studi Dokumentasi.

Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa, buku, majalah, notulen rapat, *slide* presentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini digunakan untuk melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, teknik ini berfungsi untuk menghimpun data sebagai bahan landasan teori.

F. Instrumen Penelitian

Untuk dapat menjadi instrument, peneliti harus memiliki bekal wawasan yang luas dan teori yang kuat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti Sendiri (*Human Instrument*), hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, *human instrument* bersifat *holistic emphasize*”, artinya hanya manusialah “alat” yang dapat memahami keseluruhan konteks. *Human instrument* memungkinkan perluasan pengetahuan secara langsung karena memang berhubungan langsung dengan responden sehingga memungkinkan untuk memahami makna dari berbagai bentuk interaksi di lapangan.

2. Untuk teknik wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan *voice recorder*.
3. Untuk teknik observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian melalui penggunaan catatan anekdot dan peralatan teknis berupa kamera digital.
4. Untuk studi dokumentasi, peneliti menggunakan daftar cocok (*check list*) mengenai naskah kearsipan baik berupa *hardcopy* ataupun *softcopy*.

G. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas menurut Sugiyono (2014) adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sehingga data yang valid merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Ada perbedaan yang mendasar mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, yang diuji adalah validitas dan reliabilitas instrument penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Pengujian validitas dan reliabilitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability.

1. Uji Kredibilitas. Uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain:

- a. Perpanjangan Pengamatan. Peneliti kembali melakukan pengamatan dan wawancara di lapangan. Artinya, hubungan peneliti dengan narasumber semakin akrab, terbuka, dan saling percaya sehingga tidak ada informasi yang ditutupi lagi.
- b. Peningkatan ketekunan penelitian. Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan sehingga kepastian dan urutan data terekam secara pasti dan sistematis.
- c. Triangulasi. Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, antara lain: triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data.
- d. Analisis Kasus Negatif. Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan, maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
- e. Menggunakan Bahan Referensi. Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data-data yang ditemukan sebaiknya dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.
- f. Mengadakan Member Check. Proses pengecekan data yang telah diperoleh oleh peneliti kepada narasumber. Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang dimiliki oleh peneliti dengan yang diberikan oleh narasumber. Apabila data yang ditemukan disepakati berarti data tersebut dapat dikatakan valid.

1. Uji Transferability.

Uji ini berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat ditetapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya sehingga pembaca dapat memutuskan untuk mengaplikasikan atau tidak hasil penelitian tersebut di tempat lain.

2. Uji Dependability dan Konfirmability.

Uji dependability dilakukan dengan mengaudit seluruh proses penelitian yang dilakukan oleh auditor yang independen. Sedangkan uji konfirmability hampir sama dengan uji dependability, yaitu pengujian hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Oleh karena itu, dua pengujian ini seringkali dilakukan bersama.

H. Metode Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif karena dengan menggunakan analisis data peneliti dapat menjelaskan bagaimana proses penelitian dari tahap awal hingga tahap akhir. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif Model Miles and Huberman (1994) yang telah disempurnakan oleh Saldana (2014:33) yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan pada berakhirnya pengumpulan data. Dapat dikatakan, pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus hingga tuntas dan peneliti merasa data yang telah dikumpulkan sudah cukup untuk digunakan sebagai bahan penelitiannya. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai cara seperti observasi, wawancara, dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengacu pada proses menetapkan, memfokuskan, menyederhanakan dan mengubah data yang muncul pada catatan lapangan, transkripsi wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empirisnya. Dengan kondensasi, dapat membuat data menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Kondensasi data tidak dapat dipisahkan dari analisis, karena merupakan bagian dari analisis itu sendiri. Dalam proses pengumpulan data selanjutnya terjadi kondensasi yaitu penulisan data menjadi rangkuman, pengkodean, pengembangan tema, menghasilkan kategori, dan menulis catatan secara analitik. Peneliti memutuskan untuk memilah-milah kode dan data yang akan keluar, memilih kategori label yang baik untuk dipaparkan serta dikembangkan. Kondensasi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, mengurutkan, memfokuskan, membuang dan mengatur data sedemikian rupa sehingga keimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan kondensasi data, data kualitatif bisa diubah dalam banyak hal seperti melalui seleksi, melalui ringkasan atau paraphrase, data dapat dimasukkan kedalam pola yang lebih besar.

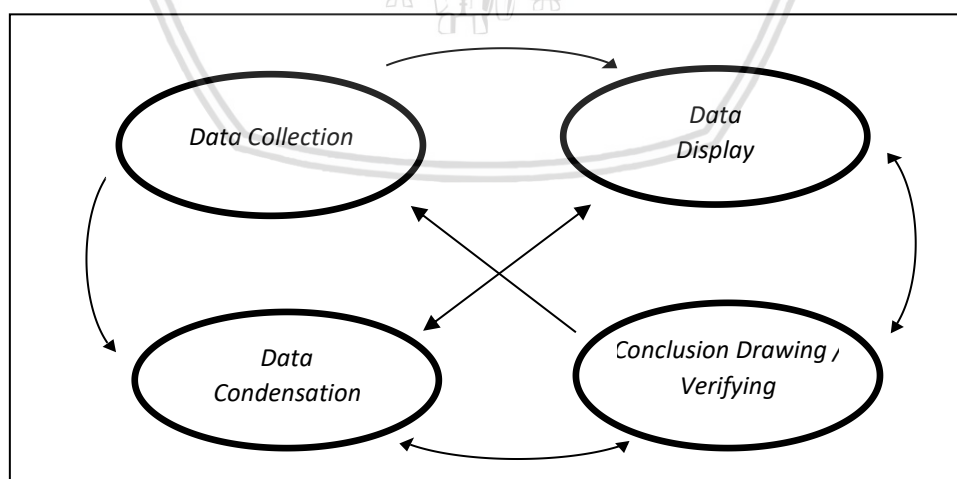
3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam kegiatan ini, semua data dan informasi ditampilkan dan secara terorganisir sehingga memungkinkan untuk penggambaran kesimpulan dan tindakan selanjutnya. Data ditampilkan dan

diilustrasikan dalam matriks, grafik, dan jaringan. Semua informasi dan data diorganisir untuk memudahkan peneliti dan pembaca untuk melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan. Seperti kondensasi data, penyajian data tidak dapat dipisahkan dari analisis, karena merupakan bagian dalam analisis.

4. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Merupakan proses penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian dilakukan di lapangan. Data yang diperoleh disajikan kemudian dilakukan analisis atas data tersebut sehingga memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang telah ditentukan akan diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian masih berlangsung hingga memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini penyajian data akan lebih banyak menggunakan kata-kata dan penjelasan daripada angka karena peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, angka yang ada hanya sebagai pelengkap data dan sebagai pendukung data agar kesimpulan dari penelitian bisa dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.



Gambar 3.1

Components of Data Analysis: Interactive Model Miles & Huberman

Sumber: Miles, Huberman, Saldana (2014:33)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Aspek Geografi dan Demografi

Letak suatu wilayah terhadap wilayah yang lain akan sangat mempengaruhi tingkat kemajuan dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, gambaran umum mengenai posisi suatu wilayah di muka bumi menjadi bahan dasar untuk perencanaan pengembangan wilayah tersebut di masa mendatang. Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 11.006 ha atau 110,06 km² dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

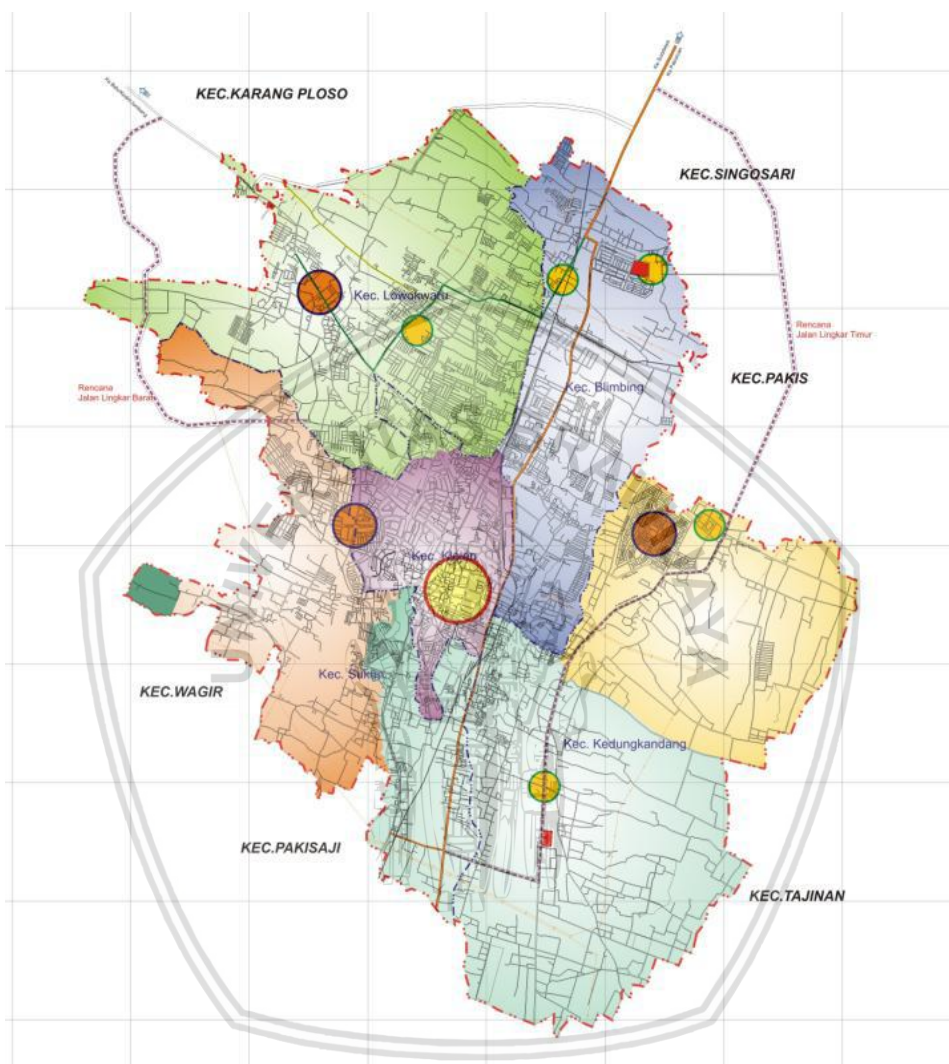
Serta dikelilingi gunung-gunung, yakni:

- Gunung arjuno di sebelah Utara
- Gunung Semueru di sebelah Timur
- Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- Gunung Kelud di sebelah Selatan

Dalam ketetapan tentang pembagian wilayah, Kota Malang secara administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan tersebut, terbagi lagi menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT). Dilihat dari aspek topografis, Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang. Lokasi administrasi Kota Malang, dipandang dari aspek hidrologis, terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Di dalam CAT Brantas terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus untuk bahan baku air minum.

Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan maupun untuk saluran pembuangan akhir dari drainase kota. Di wilayah Kota Malang terdapat 4

(empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari- Bango, dan Sungai Amprong.



Gambar 4.1 Peta Kota Malang
Sumber : website Kota Malang (malangkota.go.id)

b.Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kota Malang

Pembangunan Kota Malang yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata

dan budaya, pendidikan, serta perlindungan sosial. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pencapaian pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi bagi masyarakat Kota Malang, dapat diindikasikan dari tingkat pencapaian PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) baik menggunakan dasar penghitungan harga konstan maupun harga berlaku. PDRB ini dikelompokkan ke dalam sembilan sektor, yaitu sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa.

Dilihat dari data PDRB, Kota Malang mempunyai nilai PDRB yang tinggi berturut-turut dari sektor Tersier, Sekunder dan terakhir sektor Tersier lagi. Sektor Primer tidak terlalu banyak memberikan kontribusi bagi Kota Malang. Fenomena ini menunjukkan bahwa tipikal Kota Malang bukanlah daerah agraris yang mengandalkan bidang pertanian, dan bukan pula sebagai kawasan pertambangan dan/atau galian. Lebih jelasnya, ketiga sektor tertinggi penyumbang PDRB Kota Malang adalah:

- Perdagangan, Hotel dan Restoran (Sektor Tersier),
- Industri Pengolahan (Sektor Sekunder), dan
- Jasa-Jasa (Sektor Tersier)

Dengan demikian, untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang, upaya-upaya bidang ekonomi yang dapat

dilakukan dan perlu untuk terus dikembangkan adalah dengan memberikan perhatian yang tinggi terhadap jenis-jenis usaha di tiga bidang tersebut, maupun jenis-jenis usaha yang pada dasarnya menjadi penunjang dari ketiga sektor ekonomi tersebut di atas.

2. Gambaran Umum Kelurahan Gading Kasri

a. Letak Geografi Kelurahan

Kelurahan Gading Kasri merupakan bagian dari Kecamatan Klojen Kota Malang. Luas Wilayah 90,98 Ha, dengan kordinat wilayah terletak pada Longitude: -7.9790693 dan Latitude: 112.6219486 dan secara administratif, Kelurahan Gading Kasri memiliki 6 RW dan 50 RT dengan batas wilayah sebagai berikut:

- ◆ Sebelah utara : Kelurahan Sumpstersari dan Kelurahan Oro-oro dowo
- ◆ Sebelah timur : Kelurahan Kauman dan Kelurahan Oro-oro dowo
- ◆ Sebelah selatan : Kelurahan Bareng
- ◆ Sebelah barat : Kelurahan Pisang Candi dan Kelurahan Karang Besuki

b. Kondisi Fisik Dasar

Pembahasan mengenai kondisi fisik dasar Kelurahan Gading Kasri meliputi kondisi topografi, kondisi geologi dan kondisi klimatologi.

Kondisi topografi Kelurahan Gading Kasri terletak pada ketinggian 420 - 485 mdpl (meter di atas permukaan laut). Tingkat kelerangan lahan

kelurahan gading kasri berkisar antara 0 - 8%. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah kelurahan gading kasri cenderung datar.

Kondisi geologi lahan di Kelurahan Gading Kasri terdiri dari miosen dan fasies batu gamping. Dengan kata lain kondisi batuan dalam tanah di kelurahan gading kasri memiliki kandungan kalsium karbonat. Lapisan batuan miosen dan fasies batu gamping memiliki sifat yang kuat dan padat. Sehingga kondisi tanah di kelurahan gading kasri cenderung stabil.

Kondisi klimatologi ditinjau dari intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan di kelurahan gading kasri memiliki rata-rata antara 2000 - 3000 mm/tahun yang merata di seluruh wilayah kelurahan gading kasri. Hasil pengamatan stasiun klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus, dan November curah hujan relatif rendah.

3. Gambaran Umum Badan Keswadayaan Masyarakat Gading Kasri

a) Tugas Pokok BKM

Secara umum, tugas BKM adalah mengorganisasi dan mensinergikan segenap potensi masyarakat warga agar mampu mandiri dan berkelanjutan dalam menanggulangi masalah kemiskinan serta lingkungan permukiman di wilayah kelurahannya. BKM juga menjadi sumber energi dan inspirasi untuk membangun sinergi, prakarsa dan kemandirian warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan

atau kepentingan bersama memecahkan persoalan bersama dan atau menyatakan kepedulian bersama.

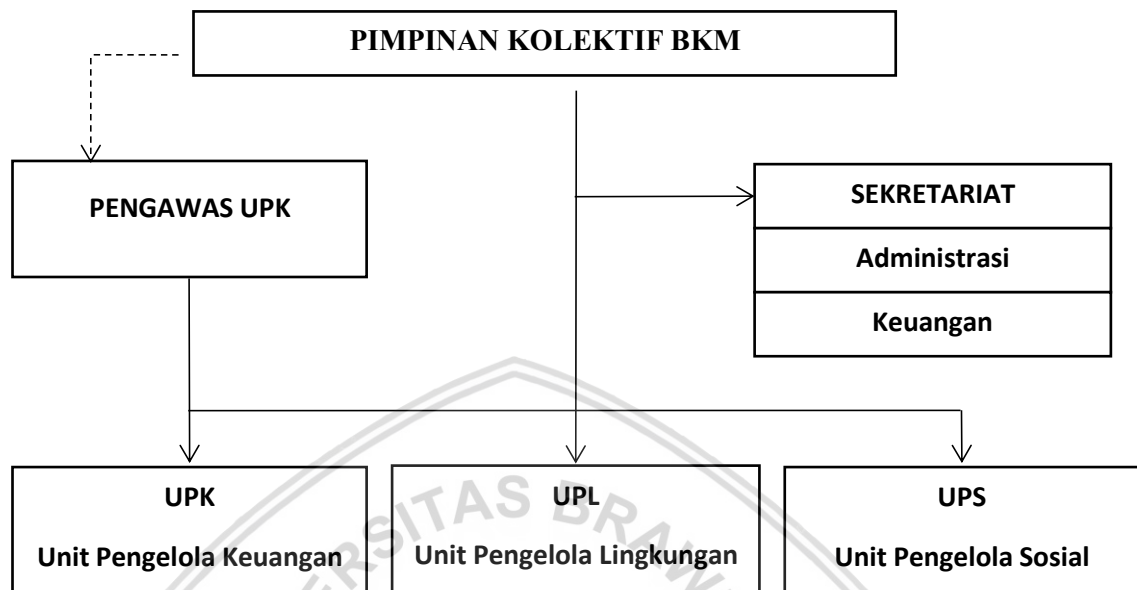
Secara khusus, BKM melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan tujuan tercapainya pengentasan permukiman kumuh di wilayah Gading Kasri.
2. Menyusun rencana program pengentasan permukiman kumuh di wilayah kelurahan Gading Kasri, berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
3. Mengorganisir dan mensinergikan potensi dan kekuatan masyarakat untuk optimalisasi upaya pengentasan permukiman kumuh wilayahnya.

b) Struktur Organisasi

Kepengurusan BKM Gading Kasri saat ini berbentuk Pimpinan Kolektif beranggotakan 13 orang, dengan dibantu UP-UP sebagai pelaksana kebijakan BKM, yang terdiri dari 1 orang UPK, 1 orang UPL dan 1 orang UPS serta 1 orang staf kesekretariatan. Dasar hukum BKM Gading Kasri untuk melaksanakan program dan kegiatannya berdasarkan pada Akta Notaris Nomor 18/2000 yang disahkan oleh Notaris Hendro Winata, S.H. pada tanggal 18 Maret 2000.

Gambar Struktur Organisasi BKM Gading Kasri periode 2014 - 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 2: Struktur Organisasi BKM Gading Kasri

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang.

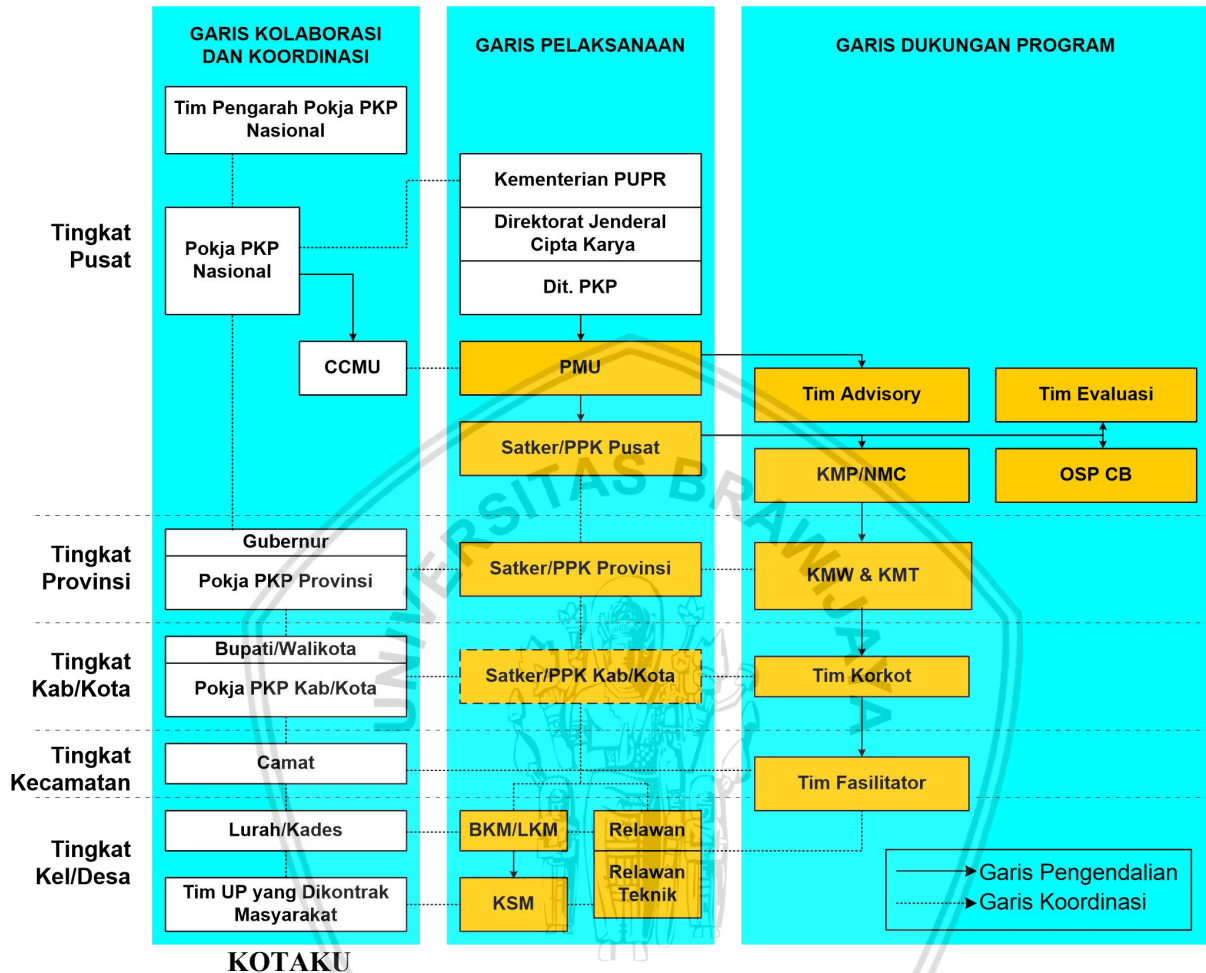
a. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun

sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen.

Adapun aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program KOTAKU yaitu:

Gambar 4. 3: Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program



Sumber: Buku Pedoman Umum Program KOTAKU (hal. 45)

BKM pada intinya adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga di tingkat Kelurahan sebagai wadah sinergi masyarakat untuk menggalang kekuatan dan potensi sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun dengan mengakses berbagai peluang sumber daya dari luar (*channeling program*), dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan dan pembangunan permukiman di wilayahnya. Ibu Dewi Nurjanah sebagai koordinator BKM Gading kasri sebagai berikut:

“kami dalam pelaksanaan program KOTAKU ini dibantu dan diarahkan oleh beberapa orang fasilitator. Fasilitator tersebut dipilih oleh pemerintah pusat. Seluruh fasilitator program KOTAKU sebelumnya telah melalui proses pelatihan dan bimbingan teknis oleh pemerintah.” (wawancara Agustus 2017)

BKM merupakan wadah bersinergi yang representatif, mengakar dan dipercaya oleh pihak luar. BKM merupakan pimpinan kolektif yang dipilih berdasarkan kriteria nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan. Anggota BKM dipilih dari orang-orang yang tinggal di Kelurahan tersebut yang dinilai oleh masyarakat dari rekam jejaknya selama hidup beraktifitas di masyarakat. Kepemimpinan kolektif ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asah, saling asih dan saling asuh antar anggota pimpinan kolektif dan pada akhirnya akan menjamin terjadinya proses demokrasi, akuntabilitas dan transparansi.

BKM Gading Kasri sebagai lembaga masyarakat diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kelurahan Gading Kasri. Namun tidak ada satupun program yang sempurna dalam aspek keberhasilannya. Pada tanggal 31 Desember 2014 Program PNPM-MP telah berakhir, tetapi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan tidaklah berakhir begitu saja di BKM Gading Kasri, tetapi tetap berlanjut dengan adanya Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP), P2KKP

adalah program transisi dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan yang dilaksanakan di tahun 2015. Sebelumnya PNPM sudah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kelurahan Gading Kasri sejak 2007 sampai 2014. P2KKP terlebih dahulu menyajikan profil baseline dari masing-masing wilayah sebagai dasar untuk menentukan tujuh indikator kawasan kumuh. Tujuh indikator +1 tersebut adalah:

1. Keteraturan bangunan
2. Jalan lingkungan
3. Drainase
4. Air bersih
5. Sampah
6. Sanitasi
7. Fasilitas kebakaran
8. RTH (Ruang Terbuka Hijau)

Dengan dasar munculnya tujuh indikator yang dilaksanakan oleh TIPP, maka akan tampak kawasan kumuh, maka Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional yang menjadi basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan. KOTAKU mempunyai tujuan untuk membangun system yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh yang mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi “basis kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan

infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendamping teknis untuk mendukung tercapainya sasaran. Ibu Agustin selaku Sekretariat BKM juga menjelaskan:

“sebenarnya semua anggota dalam BKM ini berperan sebagai pimpinan kolektif dengan satu koordinator. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok antara satu dengan yang lain seperti pada struktur resmi yang ada ketua, wakil, dan anggota. Semuanya dinilai sama dan sejajar.” (wawancara Januari 2018)

Pada dasarnya BKM menganut pola kolektif kolegial, dimana tidak ada pengurus yang mempunyai kekuasaan yang berlebihan, semua pengurus mempunyai kewenangan yang sama. Untuk memudahkan operasional BKM maka ditetapkan struktur kepengurusan BKM Gading Kasri seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Lurah Gading Kasri nomor: 188.51/03/35.73.02.1010/2017. Susunan Keanggotaan Pimpinan Kolektif BKM Gading Kasri Masa Bakti 2017 - 2019 sebagai berikut:

NAMA	ALAMAT	JABATAN
Dra. Dewi Nurjanah, MM. AFP	Jl. Simpang Gading 26 Malang	Koordinator BKM
Drs. Mindarto	Jl. Galunggung Malang	Pimpinan Kolektif
Bagus R	Jl. Galunggung Malang	Pimpinan Kolektif
Sisnoto	Jl. Gading Pesantren Malang	Pimpinan Kolektif
Dra. Hariyani	Jl. Klampok Kasri Malang	Pimpinan Kolektif
Kariyadi	Jl. Klampok Kasri Malang	Pimpinan Kolektif
Fathor Rahman, SH. M.Hum	Jl. Gading Malang	Pimpinan Kolektif
A. Firdiansyah	Jl. Gading Malang	Pimpinan Kolektif

Imam Bukori, SH	Jl. Gading Malang	Pimpinan Kolektif
Siti Rochmah	Jl. Jombang Malang	Pimpinan Kolektif
Zaenal Arifin	Jl. Jombang Malang	Pimpinan Kolektif
Haryadi, SPd	Jl. Jombang Malang	Pimpinan Kolektif
Mujiono	Jl. Jombang Malang	Pimpinan Kolektif
Sekretariat dan Unit Pengelola		
Agustin Tri Lestari, Spd	Jl. Gading No. 20	Sekretariat
Erna Sudarwati, SE	Jl. Klampok Kasri Malang	UPK
Moch. Ichwan	Jl. Gading Malang	UPL
Abdul Rohman	Jl. Gading Malang	UPL
Sumiati	Jl. Jombang Malang	UPS

*Sumber: Surat Keputusan Lurah Gading Kasri nomor
188.51/03/35.73.02.1010/2017*

BKM Gading Kasri dikelola secara kolektif kolegial (presidium) dengan menunjuk dan atau memilih dalam rembug PK BKM, salah seorang PK BKM menjadi koordinator. Semua PK BKM memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masa pengabdian selama tiga tahun dihitung sejak pelaksanaan rembug warga pembentukan PK BKM serta dapat diangkat kembali pada satu kali periode berikutnya. Hubungan BKM Gading Kasri dengan perangkat Kelurahan Gading Kasri dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat Kelurahan tidak bersifat struktural formal, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu dengan lainnya. Anggota pimpinan kolektif BKM Gading Kasri adalah warga yang tinggal di Kelurahan Gading Kasri yang memenuhi

kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang telah ditetapkan warga dan dipercaya warga untuk mengemban amanat masyarakat.

Lembaga yang ada di Kelurahan Gading Kasri seperti, Kelompok Swadaya Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW) dan Pemerintah Kelurahan sangat membantu proses terwujudnya program ini. Sebagian besar lembaga-lembaga yang terdapat di Kelurahan Gading Kasri tersebut sudah mempunyai data konkrit, terutama data terkait dengan MBR. Sehingga, data dasar terkait masalah sosial lebih mudah didapatkan. Adapun kedepan yang perlu perhatian adalah penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kepedulian, kesadaran terhadap lingkungannya.

Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdapat di Kelurahan Gading Kasri sebagian besar berada di RW 02 dengan total 36 KSM aktif. Tingginya peran masyarakat dalam proses pembangunan wilayah juga dapat ditinjau dari banyaknya jumlah KSM aktif yang terdapat di suatu wilayah tersebut. Konsep pembentukan KSM adalah masyarakat mandiri. Jadi, dalam proses pembangunan KSM-lah yang merencanakan kegiatan, melaksanakan proses pembangunan dari apa yang sudah direncanakan serta memanfaatkan dan memelihara hasil dari pembangunan tersebut.

Dalam kaitannya dengan program pengentasan kumuh, KSM memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peran KSM dalam pengentasan kumuh adalah mengawasi pelaksanaan program yang telah direncanakan serta bertanggung jawab dalam memelihara hasil dari program yang telah dibangun tersebut, terutama apabila program yang direalisasikan bersifat fisik (pembangunan fasilitas umum dan jaringan prasarana), seperti jalan, saluran drainase, MCK umum dan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Ibu Dewi Nurjanah selaku Koordinator BKM:

“jadi warga juga dituntut berperan aktif dalam program ini. Mulai dari perencanaan program apa yang akan diajukan ke pusat, hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan dan juga pemeliharaan setelah perbaikan dilakukan. Karena bagaimanapun juga program ini dimaksudkan langsung untuk masyarakat sehingga partisipasi aktif dari masyarakat sendiri sangat diperlukan.” (wawancara Agustus 2017)

Dengan melihat tingginya potensi jumlah KSM aktif yang terdapat di Kelurahan Gading Kasri, maka nantinya diharapkan KSM akan mampu mengawal pembangunan terkait pengentasan kumuh yang dilaksanakan di Kelurahan Gading Kasri. Sehingga, tujuan program pengentasan kumuh tersebut dapat tercapai.

b. Penyusunan profil permukiman kumuh kelurahan berdasarkan indikator kumuh Program Kota Tanpa Kumuh

Profil permukiman kumuh Kelurahan Gading Kasri menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri. Kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri

tersebar di empat RW, yakni di RW 01, RW 02, RW 03 dan RW 06. Permasalahan kumuh ditinjau dari permasalahan fisik dan non fisik. Permasalahan fisik terdiri dari permasalahan enam indikator kumuh, yakni keteraturan bangunan, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah (sanitasi), pengelolaan persampahan dan pengamanan bahaya kebakaran. Sedangkan permasalahan non fisik terdiri dari legalitas pendirian bangunan, mata pencaharian penduduk, penggunaan daya listrik, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan pendidikan.

Data permasalahan kumuh yang dijelaskan pada profil permukiman kumuh akan dijadikan tolak ukur keberhasilan program penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri. Program-program penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan diharapkan mampu menyelesaikan atau setidaknya mengurangi tingkat kumuh di Kelurahan Gading Kasri.

1. Kondisi Demografi

Kebutuhan informasi terkait dengan kondisi demografi berkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung suatu wilayah, bahwa kebutuhan data dan informasi yang disajikan yaitu berkaitan dengan jumlah penduduk, populasi penduduk dan luas lahan, selengkapnya kondisi kependudukan pada wilayah Kelurahan Gading Kasri dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kondisi Kependudukan di Kelurahan

RW	Σ KPL. RT	Σ KK	Σ KPLA. RT MBR	Σ KPLA. RT NON MBR	Σ PNDDK. LAKI-LAKI	Σ PNDDK. PRMPUAN
1	376	513	87	289	903	904
2	641	702	172	469	1132	1229
3	501	745	53	448	1129	1243
4	205	236	0	205	358	442
5	89	125	0	89	204	198
6	305	348	61	244	520	590

Sumber : Data Baseline Kelurahan Gading Kasri Tahun 2016

Apabila didasarkan sebaran jumlah rumah tangga MBR pada tiap RW, maka RW 02 memiliki jumlah rumah tangga MBR tertinggi dibandingkan dengan RW lainnya. Jumlah kepala keluarga MBR di RW 02 berjumlah 172 rumah tangga. Kemudian untuk RW 04 dan RW 05 tidak terdapat rumah tangga MBR.

Indikator kependudukan lain yang dapat digunakan untuk mengkaji kondisi permukiman di kawasan perencanaan adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dipengaruhi oleh luas lahan serta jumlah penduduk yang terdapat pada suatu wilayah.

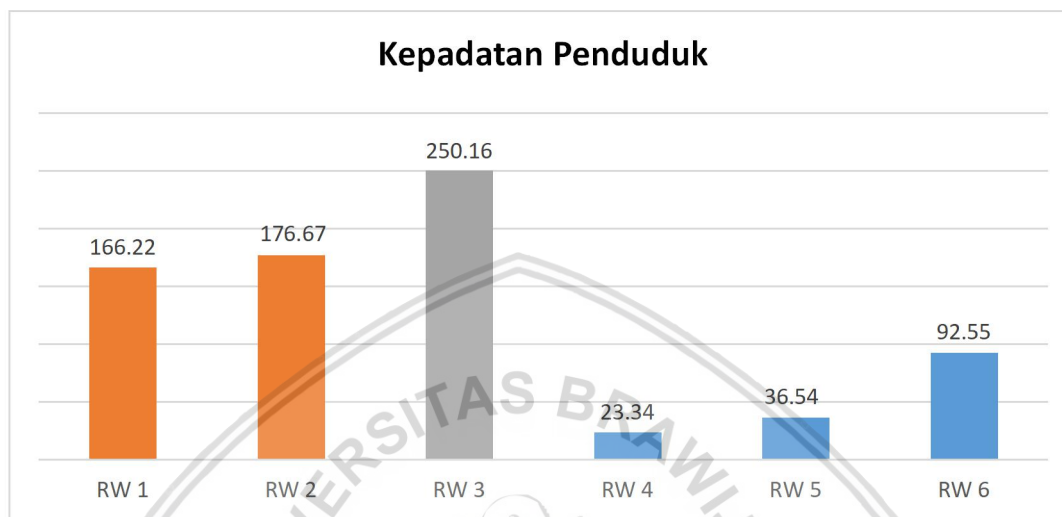
Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk di Kawasan Perencanaan

RW	KEPADATAN PENDUDUK		
	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Ha)	Σ PENDUDUK (Jiwa)	LUAS WIL. (Ha)
1	166,222	1807	10,871
2	176,669	2361	13,364
3	250,158	2372	9,482
4	23,345	800	34,269
5	36,542	402	11,001

6	92,554	1110	11,993
---	--------	------	--------

Sumber : Data Baseline Kelurahan Gading Kasri Tahun 2016

Grafik 4.1 Grafik Kepadatan Penduduk



2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya sedangkan Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya berupa jaringan jalan, jaringan saluran air limbah dan jaringan drainase.

Lahan di Kelurahan Gading Kasri yang dimanfaatkan sebagai sarana dan berbagai macam, antara lain diperuntukkan sebagai sarana pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa dan peribadatan. Berikut guna lahan Kelurahan Gading Kasri sebagai pusat sarana:

Tabel 4.3 Sarana Fasilitas di Kelurahan

JENIS SARANA	JUMLAH
PENDIDIKAN	
TK	3
SD	1
PEMERINTAHAN	
Balai Pertemuan	6
PERDAGANGAN	
Pasar Tradisional	3
Pasar Modern	6
PERIBADATAN	
Masjid	7
Gereja	0
RTH (m²)	9,098

Sumber : Data Baseline Kelurahan Gading Kasri Tahun 2016

A. Kondisi Aksesibilitas Lingkungan

Ketersediaan akses cukup penting dalam rangka mendukung aktivitas pencapaian menuju suatu kawasan maupun mendukung kegiatan pergerakan dalam kawasan. Berdasarkan ketentuan, aksesibilitas lingkungan dikatakan dapat memenuhi syarat apabila jalan lingkungan memiliki lebar dimensi lebih dari 1,5 meter, jalan lingkungan yang ada permukaannya diperkeras, kemudian tidak mengalami kerusakan serta dilengkapi dengan saluran samping jalan (saluran drainase).

DATA BASELINE 100-0-100															
Pnjg. Total Jar. Jalan Lingk. (Mtr)	18.457														
Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1,5 m (Mtr)	14.283														
Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1,5 m yang Permuk. Diperkeras (Mtr)	14.283														
Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1,5 m yang Permuk. Diperkeras dan tidak rusak (Mtr)	14.171														
Pnjg. Jalan Lingk. dengan Lebar > 1,5 m dengan Saluran Samping Jalan (Mtr)	13.688														
PROFIL PERMUKIMAN															
Kawasan permukiman terlayani jaringan jalan lingkungan yang minimum memadai	58 %														
Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas minimum memadai	54 %														
POTENSI	PERMASALAHAN														
1. Sebagian besar jalan lingkungan memiliki lebar dimensi lebih dari 1,5 meter 2. Sebagian besar jalan lingkungan di Kelurahan Gading Kasri telah memiliki perkerasan 3. Telah terdapat saluran drainase di samping sebagian besar jalan di Kelurahan Gading Kasri 4. Topografi lahan permukiman warga yang mudah diakses (datar)	1. Masih banyak jalan alternatif yang lebar dimensinya kurang dari 1,5 meter 2. Masih terdapat jalan yang rusak dan belum memiliki perkerasan 3. Masih terdapat rumah warga yang belum terhubung dengan Saluran Samping Jalan (Drainase) 4. Masih banyak jalan lingkungan yang tidak proporsional dengan keadaan topografi lahan														
DIAGRAM															
<p style="text-align: center;">JALAN LINGKUNGAN YANG LAYAK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RW</th> <th>Jumlah Jalan Layak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RW 1</td> <td>2492</td> </tr> <tr> <td>RW 2</td> <td>1389</td> </tr> <tr> <td>RW 3</td> <td>2260</td> </tr> <tr> <td>RW 4</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>RW 5</td> <td>258</td> </tr> <tr> <td>RW 6</td> <td>2003</td> </tr> </tbody> </table>		RW	Jumlah Jalan Layak	RW 1	2492	RW 2	1389	RW 3	2260	RW 4	180	RW 5	258	RW 6	2003
RW	Jumlah Jalan Layak														
RW 1	2492														
RW 2	1389														
RW 3	2260														
RW 4	180														
RW 5	258														
RW 6	2003														

Sumber: Dokumen RPLP Kelurahan Gading Kasri (hal. III-8)

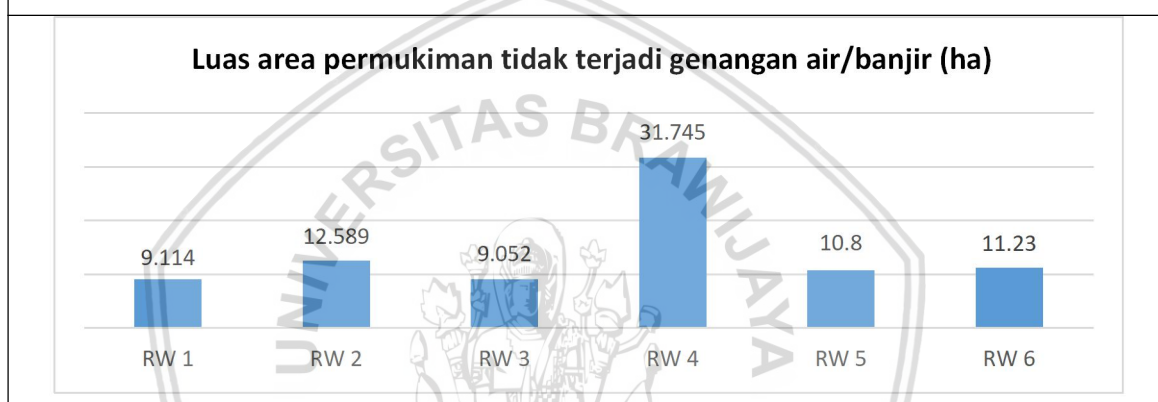
B. Kondisi Drainase Lingkungan

Jaringan drainase diperlukan pada dasarnya untuk mengalirkan limpasan air hujan pada lingkungan permukiman menuju saluran utama agar tidak terjadi genangan ataupun banjir yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan di lingkungan tersebut. Penyediaan jaringan drainase yang memadai diperlukan pada tiap lingkungan bahkan juga lingkungan permukiman kumuh. Berdasar pada ketentuan, penyediaan drainase tidak hanya sebatas pembangunan saluran saja namun terdapat kualitas minimum yang perlu dipenuhi agar fungsi saluran dapat bekerja secara optimal.

DATA BASELINE 100-0-100	
Luas area permuk. Bebas genangan air/ banjir (ha)	84,5295
Panjang total drainase (meter) pnjg. Jalan lingk. Dgn lebar >1,5 meter yang permuk. Diperkeras dan tidak rusak (mtr)	16.533
Pnjg. Jar. Drainase dgn kualitas minimum memadai (meter)	16.524
PROFIL PERMUKIMAN	
Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir	93 %
Kondisi jaringan drainase di lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai	90,95 %
POTENSI	PERMASALAHAN
1. Sebagian besar jalan lingkungan telah memiliki saluran drainase untuk aliran air hujan 2. Sebagian besar kondisi jaringan drainase sudah baik	1. Masih terdapat banyak saluran drainase yang rusak 2. Masih terdapat saluran drainase yang tersumbat dan mengalami sedimentasi 3. Masih terdapat beberapa genangan ketika terjadi hujan 4. Masih terdapat beberapa permukiman yang tidak terhubung dengan saluran drainase

	<p>5. Terdapat banyak saluran drainase yang kapasitasnya kurang memadai sehingga menimbulkan genangan</p> <p>6. Adanya penyempitan saluran sekunder (sungai) karena adanya pembangunan permukiman yang menggunakan badan sungai</p> <p>7. Semakin berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai area resapan air</p>
--	--

DIAGRAM



Sumber: Dokumen RPLP Kelurahan Gading Kasri (hal. III-11)

C. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga

Upaya pengelolaan limbah terutama limbah cair perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman. Pengelolaan air limbah pada lingkungan permukiman dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap jamban, kualitas jamban sesuai dengan persyaratan teknis serta saluran pembuangan air limbah rumah tangga yang terpisah dengan saluran drainase lingkungan.

DATA BASELINE 100-0-100	
Σ Masy. dgn. akses jamban kel./jamban bersama (5 KK/jmbn) (Unt)	2.098
Σ Jamban kel./jamban bersama sesuai persy. teknis (Unt)	1.987
PROFIL PERMUKIMAN	

Masyarakat memiliki akses jamban keluarga/jamban bersama (5 KK/jamban)	99 %														
Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank)	95 %														
Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan	57 %														
POTENSI	PERMASALAHAN														
1. Sebagian besar masyarakat mempunyai jamban keluarga/jamban bersama 2. Sebagian besar jamban keluarga di masyarakat sudah sesuai dengan persyaratan teknis 3. Telah terdapat IPAL komunal di RW 03	1. Masih terdapat beberapa keluarga yang tidak memiliki jamban/memiliki jamban yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis 2. Jumlah dan kapasitas jamban bersama kurang memadai dibandingkan dengan jumlah keluarga yang memanfaatkannya 3. Beberapa wilayah masih memerlukan tambahan IPAL komunal 4. Sebagian besar saluran air limbah rumah tangga menjadi satu dengan saluran drainase														
DIAGRAM															
<p style="text-align: center;">Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga/jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RW</th> <th>Jumlah Masyarakat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RW 1</td> <td>366</td> </tr> <tr> <td>RW 2</td> <td>641</td> </tr> <tr> <td>RW 3</td> <td>492</td> </tr> <tr> <td>RW 4</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>RW 5</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>RW 6</td> <td>305</td> </tr> </tbody> </table>		RW	Jumlah Masyarakat	RW 1	366	RW 2	641	RW 3	492	RW 4	205	RW 5	89	RW 6	305
RW	Jumlah Masyarakat														
RW 1	366														
RW 2	641														
RW 3	492														
RW 4	205														
RW 5	89														
RW 6	305														

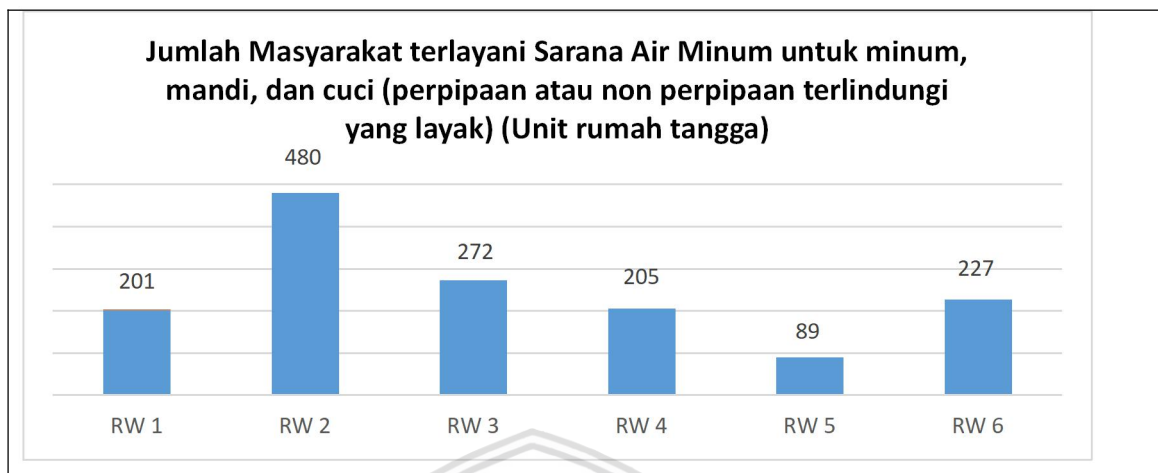
Sumber: Dokumen RPLP Kelurahan Gading Kasri (hal. III-11)

D. Kondisi Penyediaan Air Minum

Air merupakan salah satu kebutuhan penting yang menunjang kehidupan manusia, baik berupa air minum atau air bersih. Ketersediaan air tidak hanya diperlukan untuk minum, tetapi juga untuk memasak, mandi, mencuci dan aktivitas rumah tangga lainnya.

Berdasar pada ketentuan, kebutuhan air minum minimal untuk mendukung aktivitas minum, mandi, cuci tiap orang perhari adalah sebanyak 60 liter. Sarana air minum yang digunakan untuk melayani kebutuhan air minum dapat berupa jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan (sumur dan lainnya) yang terlindung dengan layak dan dapat diakses oleh masyarakat secara sehari-hari.

DATA BASELINE 100-0-100	
Σ Masy. Terlayani air minum untuk minum & MCK yang layak (Unit)	1.474
Σ Masy. Terpenuhi Keb. Air minum & MCK (Min. 60 liter/org/hari) (Unit rumah tangga)	2.117
PROFIL PERMUKIMAN	
Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak)	76 %
Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60 liter/org/hari)	100 %
POTENSI	PERMASALAHAN
1. Distribusi air PDAM hampir menyeluruh di semua RW 2. Sebagian besar penduduk sudah terlayani air bersih PDAM	1. Terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air bersih 2. Terdapat rumah tangga yang masih menggunakan sumber air yang tidak layak dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari 3. Tingginya pemakaian air tanah tidak diimbangi dengan penyerapan air tanah karena semakin berkurangnya area resapan air
DIAGRAM	

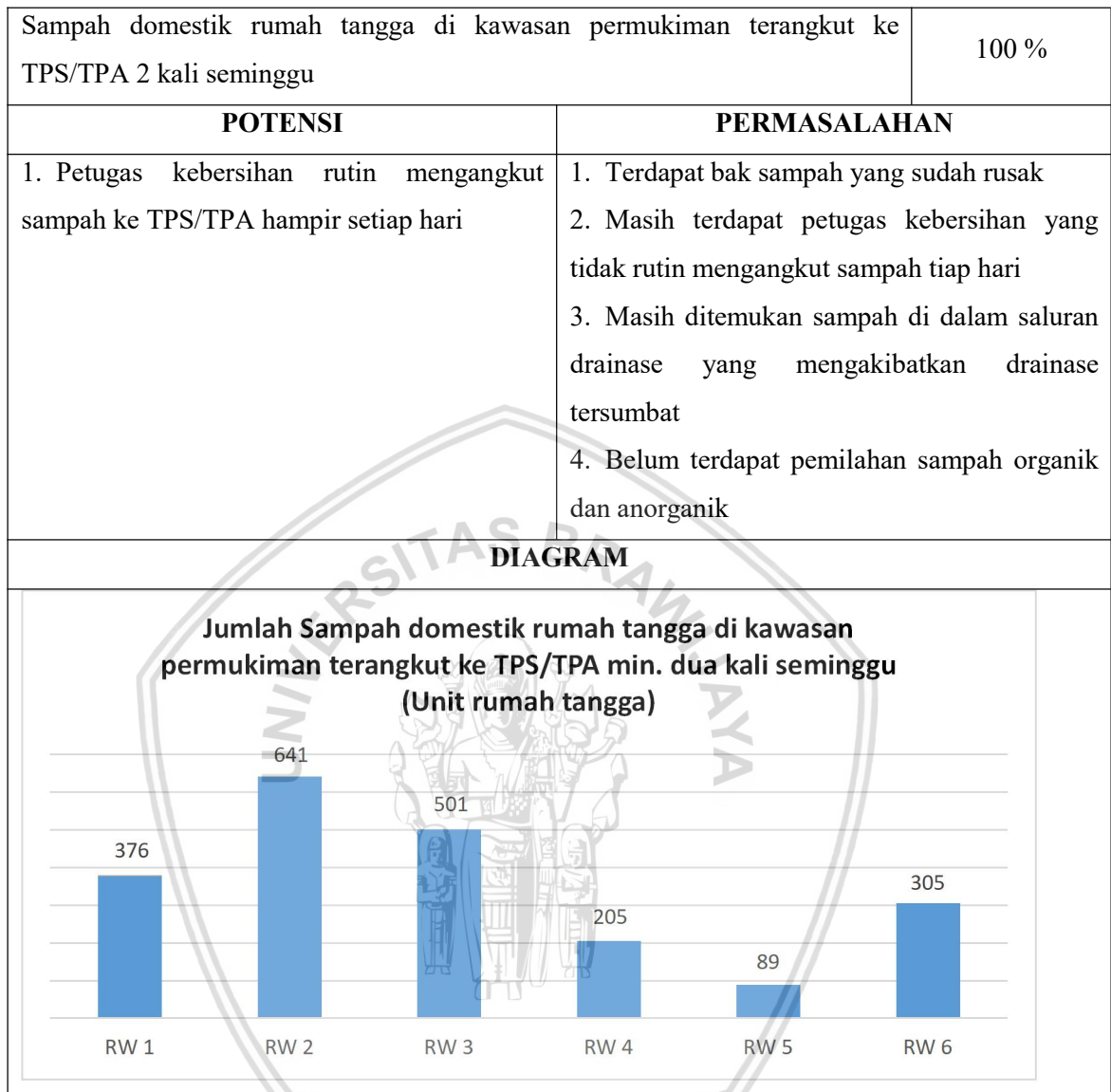


Sumber: Dokumen RPLP Kelurahan Gading Kasri (hal. III-16)

E. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Keberadaan sampah dapat menjadi sumber permasalahan pada lingkungan permukiman, mulai dari kondisi kebersihan, estetika lingkungan dan lainnya. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah harus dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga dan dilakukan secara menyeluruh sampai dengan tingkat pengolahan akhir. Tinjauan terhadap pengolahan persampahan pada kawasan permukiman ini dapat didasarkan pada data jumlah rumah tangga yang sampahnya terangkut ke TPS/TPA paling tidak 2 (dua) kali dalam seminggu. Indikasi tersebut juga dapat menggambarkan kondisi sistem pengolahan persampahan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat maupun oleh instansi pemerintahan daerah.

DATA BASELINE 100-0-100	
Σ Sampah domestik RT terangkut ke TPS/TPA min. 2x seminggu (Unit) Σ Masy. terpenuhi keb. Air minum dan MCK (Min. 60 liter/org/hari) (Unit rumah tangga)	2.117
PROFIL PERMUKIMAN	



Sumber: Dokumen RPLP Kelurahan Gading Kasri (hal. III-16)

F. Tata Guna Lahan

Karakteristik penggunaan lahan pada Kelurahan Gading Kasri secara umum didominasi oleh guna lahan perumahan beserta fasilitas umum pendukung permukiman (fasilitas perdagangan, peribadatan, industri, pemerintahan, ruang terbuka hijau serta pendidikan). Seiring dengan penambahan dan perkembangan penduduk, Kelurahan Gading Kasri yang dahulu didominasi oleh permukiman saat ini

hampir keseluruhan sudah berubah menjadi perdagangan dan jasa. Salah satu indikasi yang dapat terlihat akibat perubahan tersebut adalah hampir minimnya lahan kosong yang dapat digunakan untuk aktifitas pengembangan guna lahan fungsional yang baru. Berikut merupakan luas penggunaan lahan di wilayah Kelurahan Gading Kasri.

DATA PERUNTUKAN LAHAN (Luas)	
Perumahan	18,196 Ha
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9,098 Ha
Sarana Umum	29,114 Ha
Perdagangan & Jasa	18,196 Ha
Industri & Pergudangan	10,008 Ha
Sarana Khusus	6,369 Ha

Tabel 4. 4 Tata Guna Lahan

G. Kondisi Bangunan

Variabel yang diperlukan dalam identifikasi kawasan permukiman terkait dengan bangunan ini adalah kondisi keteraturan bangunan dan kepadatan bangunan pada lingkungan permukiman. Keteraturan bangunan perlu di tinjau karena mempengaruhi kondisi kenyamanan dan keindahan lingkungan permukiman, dimana parameter yang diukur adalah jumlah bangunan hunian yang berada dalam kondisi teratur.

Tabel 4.5 Keteraturan dan Kepadatan bangunan

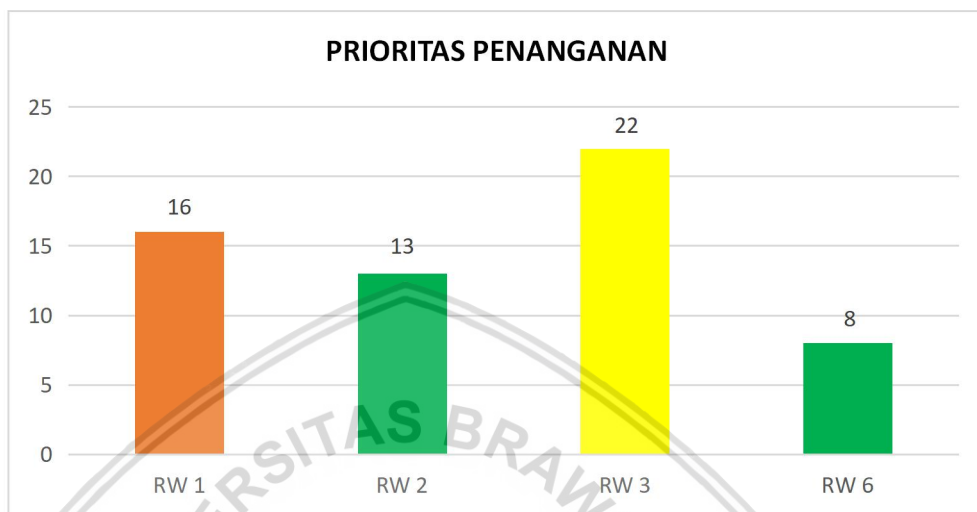
RW	KETERATURAN BANGUNAN		KEPADATAN BANGUNAN		
	Σ BANG. TERATUR (Unit RT)	PROPO RSI (%)	LUAS KAW. PERMUKIM. (Ha)	Σ TOTAL BANGUN. (unit)	TINGKAT KEPADATAN BNG. (Unit/Ha)
1	279	78%	9.26	487	700.495
2	353	54%	12.81	712	702.080
3	288	54%	9.32	554	742.248
4	205	100%	31.89	295	60.598
5	89	100%	10.8	161	83.438
6	289	94%	11.23	371	418.699

Sumber: Data Baseline Kelurahan Gading Kasri Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 4.5, tingkat keteraturan bangunan paling tinggi berada pada RW 04 dan RW 05 mencapai 100% dengan jumlah bangunan yang teratur sebanyak 205 unit (RW 04) dan 89 unit (RW 05) dari sejumlah 205 unit (RW 04) dan 89 unit (RW 05) bangunan hunian. Sedangkan, tingkat keteraturan bangunan yang paling rendah terdapat pada RW 02 dan RW 03 dengan nilai masing-masing sebesar 54% atau bangunan yang teratur hanya sebesar 191 unit dari 353 unit bangunan hunian (RW 02) dan sebesar 155 unit dari 288 unit bangunan hunian (RW 03).

Salah satu ciri dari kawasan kumuh adalah memiliki kepadatan bangunan yang cukup tinggi. Berdasarkan tingkat kepadatan bangunan, wilayah yang memiliki kepadatan bangunan paling tinggi adalah RW 03 yang mencapai 742 unit bangunan per hektar. Sedangkan, wilayah RW dengan kepadatan bangunan paling rendah

adalah RW 04 dengan tingkat kepadatan bangunan sekitar 60 unit per hektar.



Grafik 4.2 Kawasan Prioritas Penanganan Kumuh di Kelurahan Gading Kasri

Sumber: Hasil olahan data dari tabulasi permasalahan kekumuhan

Berdasarkan **Grafik 4.2** lokasi prioritas penanganan 1 berada di RW 03 dengan permasalahan utama pelayanan air minum, aksesibilitas lingkungan dan sanitasi. Lokasi prioritas 2 berada di RW 01 dengan permasalahan utama pelayanan air minum, aksesibilitas lingkungan dan sanitasi. Lokasi prioritas 3 berada di RW 02 dengan permasalahan utama pelayanan aksesibilitas lingkungan dan pelayanan air minum. Lokasi prioritas 4 berada di RW 06 dengan permasalahan utama pelayanan air minum, aksesibilitas lingkungan dan sanitasi.

Hasil perhitungan penentuan lokasi prioritas menyajikan gambaran kompleksitas permasalahan kumuh yang terdapat pada tiap RW di Kelurahan Gading Kasri. Gambaran kompleksitas masalah

diperoleh dari database Kelurahan Gading Kasri tahun 2015. Data terkait kompleksitas permasalahan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kawasan prioritas penanganan kumuh di Kelurahan Gading Kasri. Hasil perumusan kawasan kumuh berdasarkan kompleksitas masalah yang mengacu pada databaseline dapat berubah sesuai dengan hasil musyawarah masyarakat. Perubahan kawasan prioritas dapat terjadi apabila pada kawasan prioritas dengan nilai tertinggi memiliki kendala dalam penanganan, seperti kendala pengadaan lahan. Selain itu, perubahan kawasan prioritas penanganan juga dapat terjadi apabila permasalahan kumuh (lima indikator) di kawasan prioritas dengan nilai tertinggi telah tertangani oleh program lainnya, seperti program SANIMAS (Sanitasi Masyarakat, program kolaborasi, dan lainnya).

Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan masyarakat di Kelurahan Gading Kasri, penentuan kawasan prioritas penanganan kumuh di Kelurahan Gading Kasri mengalami perubahan. Kawasan prioritas penanganan 1 yang semula ditetapkan di RW 03 bergeser ke RW 01 dengan pertimbangan sebagai berikut:

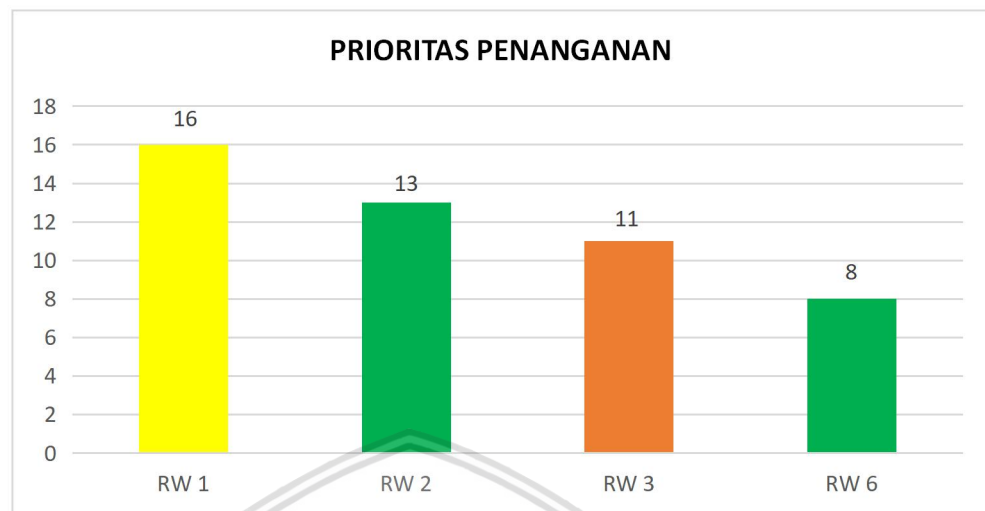
- a. Telah terdapat 2 (dua) program di RW 03 terkait perbaikan sanitasi masyarakat yang mencakup 5 (lima) RT, yakni RT 04, RT 09, RT 10, RT 11 dan RT 12.

b. Telah terdapat program di RW 03 terkait pelayanan air minum berupa pengadaan HIPAM yang mencakup 6 (enam) RT, yakni RT 07, RT 08, RT 09, RT 10, RT 11 dan RT 12.

c. Dengan adanya program terkait pengentasan masalah air minum dan sanitasi di RW 03 tentunya akan mengubah total nilai. Apabila dilakukan dengan perhitungan ulang terkait 5 (lima) indikator kumuh, maka RT yang telah mendapat bantuan dari kedua program tidak lagi dimasukkan dalam perhitungan. Ibu Dewi Nurjanah selaku koordinator BKM juga menjelaskan tahapan awal adanya program KOTAKU:

“jadi dulu sebelum masuk program KOTAKU ada program P2KKP tentang permukiman kumuh perkotaan. Pada akhir 2015 sudah dilaksanakan tahap pertama program KOTAKU di RW 03 yaitu, pembuatan sanitasi IPAL dan sambungan antara rumah-rumah warga. Karena masih banyaknya warga yang tidak memiliki *septic tank*. Ada juga pelaksanaan perbaikan drainase, fiktir air/air bersih yang diambil dari tandon RW lalu disalurkan ke rumah masing-masing warga yang susah air bersih. Pembuatan pavingisasi dan juga ruang terbuka hijau juga sedang dalam proses pelaksanaan dengan memanfaatkan lahan kosong warga yang tidak berfungsi dengan baik menjadi lahan hijau yang bersih dan indah.” (wawancara Agustus 2017)

Sehingga, nilai total di RW 03 akan mengalami perubahan (penurunan nilai). Penurunan total nilai indikator di RW digambarkan pada **Grafik 4.3**



Grafik 4.3 Perubahan Kawasan Prioritas Penanganan Kumuh di Kelurahan Gading Kasri

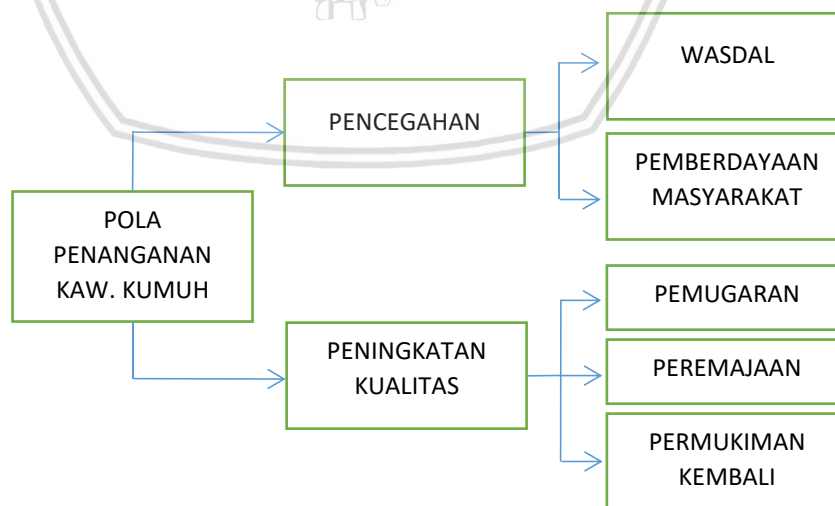
Sumber: Hasil olahan data dari tabulasi permasalahan kekumuhan

Grafik diatas menunjukkan adanya pergeseran kawasan prioritas yang semula berada di RW 03 menjadi RW 01. Perubahan kawasan prioritas penanganan kumuh didasarkan pada pengurangan jumlah RT di RW 03. Dengan demikian, maka urutan prioritas penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri adalah sebagai prioritas 1 berada di RW 01, prioritas 2 berada di RW 02, prioritas 3 berada di RW 03, dan prioritas 4 berada di RW 06.

Pelaksanaan penanganan kumuh bersifat kawasan. Bersifat kawasan berarti dalam pelaksanaannya nanti, penanganan kumuh tidak mutlak pada administrasi suatu RW. Dengan kata lain, penanganan kumuh dapat dilakukan lintas RW apabila kawasan RW tersebut memiliki tipologi kawasan yang sama dan saling berdekatan atau berada dalam satu kampung.

c. Konsep dan strategi yang digunakan dalam Penanganan Kawasan Kumuh

Perumusan kebutuhan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh kelurahan merupakan proses identifikasi untuk memperkirakan kebutuhan penanganan dalam konteks pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada skala perencanaan kelurahan. Perumusan konsep dan strategi penanganan dan peningkatan kualitas kumuh dilakukan berdasarkan hasil analisa permasalahan. Konsep pencegahan kumuh merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh baru pada lokasi-lokasi tertentu yang berpotensi mengalami kekumuhan pada masa mendatang. Sedangkan, konsep peningkatan kualitas kumuh merupakan upaya pengentasan masalah kumuh di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan prioritas penanganan kumuh.



Gambar 4.4 Skema Penanganan Kawasan Kumuh

Sumber: UU No. 1 thn 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perbedaan mendasar antara konsep pencegahan dan peningkatan kualitas terletak pada lokasi penanganannya. Konsep dan strategi pencegahan memiliki lingkup wilayah yang lebih luas, yakni di daerah atau lokasi-lokasi tertentu yang berdasarkan hasil analisa telah menunjukkan adanya potensi kumuh. Kondisi kumuh tersebut apabila tidak dicegah dikhawatirkan akan menjadi masalah kumuh baru. Sedangkan, konsep dan strategi peningkatan kualitas kumuh memiliki lingkup wilayah yang lebih spesifik. Wilayah yang menjadi lingkup penerapan konsep dan strategi peningkatan kualitas kumuh adalah lokasi yang memiliki tingkat kekumuhan paling tinggi sehingga memerlukan penanganan yang harus di prioritaskan.

Konsep penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri dibedakan menjadi konsep pengelolaan kawasan dan konsep pengentasan kawasan. Konsep pengelolaan kawasan kumuh adalah konsep pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang akan ditangani dalam penanganan kawasan kumuh. Sedangkan, konsep pengentasan kawasan kumuh adalah konsep pelaksanaan dan desain dalam program-program yang akan ditangani dalam penanganan kawasan kumuh.

A. KONSEP PENANGANAN KAWASAN KUMUH

Penanganan kawasan kumuh bertujuan untuk mengetahui tata cara pengelolaan kawasan kumuh demi mengurangi tingkat kumuh di kawasan

yang telah terdeliniasi kumuh. Konsep pengelolaan kawasan kumuh dibagi berdasarkan indikator-indikator kumuh.

1) Penataan Bangunan

Penataan bangunan dilakukan melalui rehabilitasi rumah, pembongkaran bangunan untuk pelebaran jalan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas aliran sungai. Konsep pengelolaan penataan bangunan terdiri dari:

- Pelaksanaan Kegiatan

Rehabilitasi rumah dilaksanakan pada rumah-rumah yang mengalami kerusakan secara fisik, kurangnya penghawaan, pencahayaan dan tidak memiliki sarana sanitasi yang layak. Pembongkaran bangunan dilakukan pada bangunan yang terletak diatas aliran sungai dan pembongkaran sebagian bangunan dilakukan untuk pelebaran jalan. Warga diberikan edukasi terkait dengan syarat dan ketentuan rumah yang sehat dan layak huni.

- Pemanfaatan Hasil Bangunan

Warga yang rumahnya telah diperbaiki (direhabilitasi) wajib merawat rumah dan menjaga kesehatan rumah. Warga dilarang membangun bangunan apapun diatas aliran sungai.

- Pemeliharaan Hasil Pembangunan

Mengadakan lomba kebersihan dan kesehatan rumah untuk memicu semangat warga untuk mewujudkan rumah yang sehat dan layak huni.

- Pengawasan Hasil Pembangunan

Pihak kelurahan, BKM, RW, dan RT melakukan peninjauan terhadap kualitas bangunan. Sehingga tidak terjadi pelanggaran bangunan kembali dan bangunan yang telah direhabilitasi tidak kembali kumuh.

2) Peningkatan Pelayanan Air Minum

Peningkatan pelayanan air minum dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasarana air bersih berbasis PDAM. Konsep pengelolaan pelayanan air minum terdiri dari:

- Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan dengan kerjasama bersama dinas terkait yang ada di Kota Malang. Dalam hal ini adalah PDAM Kota Malang.

- Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pengadaan sambungan rumah (SR) dilakukan berdasarkan data yang telah diusulkan pada usulan program. Pemasangan SR PDAM tidak dipungut biaya, namun biaya untuk merapikan kembali pembongkaran yang dilakukan untuk pemasangan pipa ditanggung oleh pengguna. Biaya untuk merapikan kembali bongkaran, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pengguna. Sehingga, biaya tersebut dapat berbeda antara pengguna. Biaya air PDAM bulanan ditanggung pengguna PDAM.

- Pemeliharaan Hasil Pembangunan

Pemeliharaan SR PDAM sepenuhnya merupakan tanggungjawab pengguna PDAM.

- Pengawasan Hasil Pembangunan

Pihak RW dan RT setempat beserta BKM bekerjasama dalam melakukan pemantauan secara rutin terkait SR dan kualitas air minum yang terdistribusi ke warga.

3) Penataan Sanitasi

Penataan sanitasi dilakukan melalui pengadaan Biofill Fabrikasi Komunal. Konsep pengelolaan penataan sanitasi terdiri dari:

- Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Biofill Fabrikasi Komunal dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas terkait. Dibentuknya kelompok pemelihara dan pemanfaat Biofill yang bertugas untuk mengakomodir dana iuran perawatan Biofill dari para pengguna Biofill.

- Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pemasangan SR Biofill tidak dipungut biaya, namun biaya untuk merapikan kembali pembongkaran yang dilakukan untuk pemasangan pipa ditanggung oleh pengguna. Biaya untuk merapikan kembali bongkaran, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pengguna. Sehingga, biaya tersebut dapat berbeda antar pengguna. Warga dilarang mencoret-coret bangunan fisik biofill. Warga dilarang merusak biofill. Masyarakat disekitar layanan

biofill yang akan membangun rumah baru diwajibkan menyambung biofill. Warga diluar kawasan penanganan yang ingin memanfaatkan biofill terlebih dahulu meminta izin kepada pemangku kebijakan di kawasan penanganan, dalam hal ini adalah ketua RW, dan mentaati peraturan yang telah disepakati bersama. Setelah biofill selesai dibangun, biaya pemasangan SR biofill ditanggung sendiri oleh warga yang ingin memanfaatkan biofill.

- **Pemeliharaan Hasil Pembangunan**

Dilakukan perbaikan secara berkala ketika bangunan fisik biofill mulai mengalami penurunan kualitas. Warga diwajibkan membayar iuran rutin untuk perawatan biofill

- **Pengawasan Hasil Pembangunan**

Mengadakan evaluasi terhadap bangunan fisik biofill. Semua warga disekitar pelayanan biofill diharapkan menjadi pemanfaat biofill.

4) Penataan Saluran Drainase

Penataan saluran drainase dilaksanakan dengan perbaikan dan pelebaran saluran drainase. Konsep pengelolaan penataan saluran drainase terdiri dari:

- **Pelaksanaan Kegiatan**

Perbaikan saluran drainase merupakan perbaikan fisik dan pelebaran atau peningkatan dimensi saluran-saluran. Perbaikan

saluran dilakukan pada saluran yang rusak, terdapat sampah dan endapan, serta pada saluran yang di tumbuh tanaman. Perbaikan saluran drainase dilakukan oleh warga kawasan prioritas Kelurahan Gading Kasri melalui pendanaan KOTAKU dengan bekerja sama dengan pihak dinas PU.

- Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Diperlukan ketegasan mengenai fungsi saluran drainase yaitu untuk mengalirkan kelebihan air permukaan/mengalirkan air hujan agar tidak membanjiri/menggenangi, bukan berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah permukiman. Perlu adanya pencegahan pembuangan sampah ke aliran untuk tetap menjaga kebersihan dan kelancaran saluran agar tetap berfungsi secara optimal. Dibutuhkan sosialisasi dan kesadaran warga untuk tidak membuang sampah di saluran.

- Pemeliharaan Hasil Pembangunan

Pemeliharaan saluran drainase dilakukan secara rutin dan berkala yaitu setiap dua minggu atau sebulan sekali melalui program kerja bhakti. Jenis pemeliharaan saluran yaitu dengan mengangkat sedimen, vegetasi, dan sampah yang ada di saluran saat kering.

- Pengawasan Hasil Pembangunan

Penguatan kelembagaan antara BKM dan RW setempat melalui pemberian tugas dan tanggungjawab yang jelas, mulai dari

monitoring, pemantauan dan pembuatan laporan yang rutin, menerus dan berkelanjutan.

5) Penataan Sistem Persampahan

Penataan sistem persampahan dilaksanakan dengan penyediaan alat komposter dan pengadaan gerobak dan motor. Konsep pengelolaan penataan sistem terdiri dari:

- Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan alat komposter dilakukan dengan tujuan agar masyarakat kawasan prioritas memanfaatkan sampah yang sudah dipilah yaitu sampah organik untuk dijadikan pupuk organik. Pengadaan ini menggunakan dana anggaran KOTAKU dan dilakukan pada tahun ketiga program. Komposter diletakkan di lokasi taman. Penyediaan gerobak sampah bermotor yang terpisah dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan sampah lebih lanjut. Gerobak sampah bermotor yang dimaksud adalah gerobak sampah bermotor untuk menjangkau wilayah bantaran sungai. Penyediaan gerobak sampah yang terpisah didanai oleh KOTAKU dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

- Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Penyediaan alat komposter untuk membantu masyarakat dalam mengolah sampah organik menjadi kompos yang juga bernilai ekonomis. Hasil dari komposter dapat sebagian digunakan untuk kompos atau pupuk penghijauan lingkungan kawasan prioritas

RW 1 Kelurahan Gading Kasri atau juga dapat sebagian dijual pada DKP. Penyediaan gerobak sampah bermotor yang terpisah dimaksudkan untuk mempermudah pengangkutan dan pemilahan sampah.

- **Pemeliharaan Hasil Pembangunan**

Pengelolaan dan pemeliharaan terhadap komposter dilakukan pada masing-masing RT dengan dibentuk petugas khusus pengelola komposter dari hasil sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Dilakukan pembersihan terhadap gerobak dan motor pengangkut sampah setelah selesai. Masyarakat membayar iuran rutin sampah untuk insentif petugas kebersihan dan perawatan gerobak bermotor.

- **Pengawasan Hasil Pembangunan**

Pengawasan terhadap pengadaan komposter yaitu oleh pihak RW setempat serta masing-masing ketua RT melalui pemberian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi kepengurusan komposter. Pelibatan multi instansi, maka perlu berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti DKP. Pihak RW setempat serta masing-masing ketua RT bekerjasama dengan BKM melakukan monitoring terhadap kondisi gerobak dan memberikan evaluasi terhadap kondisi gerobak sampah tersebut.

6) Penataan Jalan Lingkungan

Penataan jalan lingkungan dilaksanakan dengan perbaikandan peremajaan jalan. Konsep pengelolaan penataan jalan lingkungan terdiri dari:

- Pelaksanaan Kegiatan

Peningkatan perkerasan melalui pavingisasi yaitu pada jalan dengan kualitas rusak serta terdapat genangan air pada saat hujan sehingga para pengguna jalan menjadi terganggu dan tidak nyaman. Rencana pembiayaan pavingisasi jalan lingkungan permukiman tersebut melalui usulan warga dan dapat dialokasikan pada tahun kedua yaitu tahun 2018. Rencana pembiayaan perbaikan dan peremajaan jalan berasal dari pemerintah, dengan adanya kerjasama dinas terkait infrastruktur lingkungan permukiman. Jalan yang dapat diperbaiki melalui program KOTAKU adalah jalan dengan lebar > 1,5 meter.

- Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Pavingisasi jalan dilakukan agar membantu penyerapan air pada daerah genangan. Tidak diperbolehkan truk dengan muatan melebihi kapasitas yang ditentukan.

- Pemeliharaan Hasil Pembangunan

Melakukan pemeliharaan dan perawatan jalan paving secara berkala atau melakukan peningkatan estetika melalui pewarnaan untuk membangun persepsi masyarakat dalam menjaga perawatan terhadap jalan paving dengan motif-motif menarik.

Biaya perbaikan jalan dengan kerusakan ringan diperoleh dari swadaya warga, sedangkan biaya perbaikan dengan kerusakan berat diperoleh dari bantuan dana kelurahan atau APBD kota dengan syarat telah mengajukan proposal perbaikan jalan.

- Pengawasan Hasil Pembangunan

Pengawasan terhadap hasil pembangunan perbaikan dan peremajaan jalan yaitu pihak RW setempat dan masing-masing ketua RT serta bekerjasama dengan pihak kelurahan maupun pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melakukan peninjauan terkait kualitas jalan.

7) Pengamanan Kebakaran

Pengamanan kebakaran dilaksanakan melalui peyediaan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) pada kawasan padat penduduk yang rawan terjadi kebakaran. Konsep pengelolaan keamanan kebakaran terdiri dari:

- Pelaksanaan Kegiatan

Penyediaan 4 (empat) unit APAR pada tiap RT yang diletakkan pada kawasan padat penduduk dan diletakkan di tempat yang strategis dan mudah dijangkau.

- Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Warga tidak diperbolehkan menggunakan tabung APAR selain untuk memadamkan api/kebakaran. Warga yang melakukan pengrusakan terhadap tabung APAR (ketika tidak terjadi

kebakaran/memadamkan api) harus mengganti tabung tersebut dengan dana pribadi.

- Pemeliharaan Hasil Pembangunan

Melakukan perawatan terhadap tabung APAR dengan cara membersihkan bagian body tabung, supaya tabung tidak mengalami karat (korosi). Tabung APAR diletakkan pada tempat yang teduh sehingga terhindar dari sinar matahari serta hujan. Disarankan tabung apar diletakkan di dalam lemari kaca kecil sehingga tabung APAR lebih awet.

- Pengawasan Hasil Pembangunan

Pihak kelurahan, BKM, RW dan RT melakukan peninjauan terkait dengan ketersediaan tabung APAR sehingga dapat digunakan dan berfungsi apabila terjadi kebakaran.

8) Penyediaan RTH Publik

Penyediaan RTH publik dilaksanakan dengan pemanfaatan lahan kosong sebagai taman dan *vertical garden*. Konsep penyediaan RTH publik terdiri dari:

- Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan taman dan *vertical garden* dilakukan dengan bekerjasama bersama dinas terkait. Desain taman harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga, termasuk warga yang memiliki kebutuhan khusus (*difabel*).

- Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Dalam pemanfaatan hasil pembangunan taman perlu adanya ketegasan mengenai fungsi taman yaitu sebagai area resapan dan rekreasi warga. Kegiatan yang tidak mendukung kegiatan rekreasi dan resapan air dilarang dilakukan pada area taman. Dibutuhkan sosialisasi dan kesadaran warga untuk tidak merusak fasilitas dan tanaman yang ada.

- Pemeliharaan Hasil Pembangunan

Pemeliharaan dilakukan oleh RW dan RT serta masyarakat setempat. Taman dirawat dan *vertical garden* dikelola oleh seluruh masyarakat di kawasan penanganan bersama dengan pemangku kebijakan di kawasan penanganan.

- Pengawasan Hasil Pembangunan

Pihak RW setempat dan masing-masing ketua RT melakukan monitoring dan pemantauan secara rutin terhadap taman dan *vertical garden*.

Konsep pengentasan kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri didasarkan pada tipologi permasalahan dari masing-masing kawasan yang terdeliniasi kumuh. Tipologi permasalahan kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri di peroleh dari data permasalahan indikator kumuh yang di peroleh dari *database line* Kelurahan Gading Kasri tahun 2015. Berikut adalah penjelasan mengenai tipologi permasalahan kumuh di Kelurahan Gading Kasri pada tiap RW.

1) Permasalahan Kawasan Kumuh RW 01

RW 01 merupakan kawasan padat penduduk dimana terdapat pondok pesantren. Sehingga, terdapat banyak fasilitas penunjang kebutuhan para santri, seperti warung makan, toko klontong dan lainnya. Permasalahan kekumuhan di RW 01 di dominasi oleh masalah pelayanan air minum, aksesibilitas jalan dan sanitasi. Berdasarkan *database line*, sebanyak 46% penduduk masih menggunakan sumur sebagai sumber air, 24% perkerasan jalan lingkungan masih rusak dan 10% penduduk masih membuang limbah MCK ke saluran drainase.

2) Permasalahan Kawasan Kumuh RW 02

RW 02 merupakan kawasan padat penduduk dimana terdapat banyak fasilitas penunjang kebutuhan mahasiswa, seperti kos, warung makan, toko kelontong dan lainnya. Permasalahan kekumuhan di RW 02 di dominasi oleh masalah pelayanan air minum dan aksesibilitas jalan. Berdasarkan *database line*, sebanyak 23% penduduk masih menggunakan sumur sebagai sumber air dan 34% perkerasan jalan masih rusak.

3) Permasalahan Kawasan Kumuh RW 03

RW 03 merupakan kawasan padat penduduk yang terletak di sekitar kawasan Universitas Negeri Malang. Sehingga, terdapat banyak fasilitas penunjang kebutuhan mahasiswa, seperti kos, warung makan, toko kelontong dan lainnya. Permasalahan kekumuhan di RW 03 di dominasi oleh masalah pelayanan air minum, aksesibilitas jalan

dan sanitasi. Berdasarkan *database line*, sebanyak 48% penduduk masih menggunakan sumur sebagai sumber air, 49% perkerasan jalan lingkungan masih rusak dan 16% penduduk masih membuang limbah MCK ke saluran drainase.

4) Permasalahan Kawasan Kumuh RW 06

RW 06 merupakan kawasan padat penduduk. Permasalahan kekumuhan di RW 06 didominasi oleh masalah pelayanan air minum, aksesibilitas jalan dan sanitasi. Berdasarkan *database line*, sebanyak 48% penduduk masih menggunakan sumur sebagai sumber air, 49% perkerasan jalan lingkungan masih rusak.

Konsep penanganan dilakukan dengan dua metode yakni peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan pencegahan terhadap kawasan permukiman agar tidak terjadi kumuh. Kawasan permukiman di Kelurahan Gading Kasri yang termasuk pada strategi peningkatan kualitas merupakan kawasan terdeliniasi kumuh, meliputi RW 01, RW 02, RW 03 dan RW 06. Sedangkan, kawasan yang termasuk dalam strategi pencegahan adalah kawasan diluar deliniasi kumuh di 4 (empat) RW tersebut. Berikut ini lokasi kawasan penanganan yang membutuhkan strategi penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Gading Kasri.

Tabel 5.1 Kawasan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Gading Kasri

Kawasan Penanganan	LOKASI	Konsep Penanganan
Prioritas 1 - RW 01	RT 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 dan 09	Peningkatan Kualitas
Prioritas 2 - RW 02	Semua RT	

Prioritas 3 - RW 03	RT 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11 dan 12	
Prioritas 4 - RW 06	RT 01, 02, 03, 04 dan 06	
RW 01	RT 01	Pencegahan
RW 03	RT 05, 09	
RW 06	RT 05, 07	

Sumber: Hasil Analisa 2016

Strategi penanganan untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Gading Kasri harus tetap mengacu pada visi dan misi permukiman yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai mimpi/harapan bersama masyarakat untuk mendapatkan lingkungan penghidupan yang layak dan berkelanjutan, serta mencapai visi Indonesia bebas kumuh 2019.

BKM sebagai salah satu komponen masyarakat bersama-sama dengan komponen masyarakat yang lain serta lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan mempunyai tanggung jawab untuk berperan aktif dalam pembangunan. Persoalan pembangunan di Kelurahan Gading Kasri diupayakan penyelesaiannya dengan program-program yang ada baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Program KOTAKU bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman kumuh perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

BKM Gading Kasri juga telah melaksanakan beberapa kegiatan, khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan baik fisik, sosial maupun ekonomi.

Tabel 5.2 Kegiatan infrastruktur dan kegiatan sosial tahun 2014:

NO	KEGIATAN	LOKASI
KEGIATAN INFRASTRUKTUR		
1	Rehap rumah	RT 04 RW 06
2	Rehab rumah	RT 08 RW 01
3	Perbaikan drainase	RT 01 RW 01
KEGIATAN SOSIAL		
1	Bimbel untuk siswa gakin	RW 01, 02, 03 dan 06
2	Budidaya cabe	RT 01 RW 06
3	Pelatihan kewirausahaan	RW 03

Pelatihan pengembangan masyarakat

NO	KEGIATAN	LOKASI
1	Media warga	Kelurahan Gadingkasri
2	Pelatihan penguatan BKM, Kelurahan dan RT/RW	Kelurahan Gadingkasri

Tabel 5.3 Kegiatan BLM kolaborasi tahun 2015

NO	KEGIATAN	LOKASI
1	SR IPAL (KSM bersih)	RT 09 dan RT 11 RW 03
2	Paving, rabat ampyang dan RTH (KSM Indah)	RT 09 dan RT 11 RW 03
3	Filter air bersih dan saluran PVC 6" (KSM jernih)	RT 11 RW 03

Pelatihan pengembangan masyarakat

NO	KEGIATAN	LOKASI
1	Media warga	Kelurahan Gadingkasri
2	Pelatihan penguatan BKM,	Kelurahan Gadingkasri

	kelurahan dan RT/RW	
--	---------------------	--

Tabel 5.4 Mengelola Dana Bantuan Investasi (BDI) National Slum Upgrading Program (NUSP) tahun 2016

NO	KEGIATAN	LOKASI
Kegiatan Dana BDI - NUSP tahap 1		
1	SR IPAL dan septictank fabrikasi (KSM sehat)	RT 09, 10 dan 11 RW 03
2	Paving (KSM rapi)	RT 12 RW 03
3	Pergola, vertical garden dan penghijauan (KSM rindang)	RT 11 dan 12 RW 03
Kegiatan Dana BDI - NUSP tahap 2		
1	Pengadaan APAR, Vertical garden dan penghijauan (KSM Sehat)	RT 09, 10 dan 11 RW 03

Tabel 5.5 kegiatan program KOTAKU tahap 1 tahun 2017

NO	KSM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	IPAL RT 06	Ipal fabrikasi 2m3 + SR	RT 06 RW 01	1	unit
		Ipal fabrikasi 3m3 + SR	RT 06 RW 01	1	unit
		MCK	RT 06 RW 01	1	unit
2	IPAL RT 07	Ipal fabrikasi 4m3 + SR	RT 07 RW 01	2	unit
3	IPAL RT 09	Ipal fabrikasi 2m3 + SR	RT 09 RW 01	1	unit
		Ipal fabrikasi 3m3 + SR	RT 09 RW 01	1	unit
4	Drainase	Drainase	RT 02	20	unit

			RW 01		
--	--	--	-------	--	--

Tabel 5.6 Kegiatan Program KOTAKU tahap 2

NO	KSM	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	Drainase II	Drainase beton bertulang	RT 02, 03 dan 09 RW 01	125,5	M'
2	Paving	Pembangunan saluran air dan paving	RT 09 RW 01	49	M'
3	Drainase PVC	Pembangunan saluran air 6"	RT 03 RW 01	90	M'

Pelatihan pengembangan masyarakat tahun 2017

NO	KEGIATAN	LOKASI
1	Pelatihan Penguatan BKM dan Lurah	Kelurahan Gadingkasri
2	Pelatihan Penguatan Tim TIPP	Kelurahan Gadingkasri
3	Pelatihan OJT	Kelurahan Gadingkasri
4	Pelatihan Penguatan KSM/KPP	Kelurahan Gadingkasri
5	Pelatihan Ketrampilan	Kelurahan Gadingkasri
6	Pelatihan Relawan	Paket Cluster/ Kota
7	Pelatihan Pengelolaan Keuangan	Paket Cluster/ Kota
8	Media Warga	Kelurahan Gadingkasri

B. STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH

Untuk mewujudkan konsep penanganan kumuh, maka dibutuhkan beberapa strategi penanganan. Apabila dilihat dari tipologi permasalahan, maka strategi penanganan yang sesuai adalah dengan mengubah citra

kawasan melalui pembuatan kampung tematik dan dengan pemenuhan fasilitas dasar. Strategi penanganan kumuh di Kelurahan Gading Kasri meliputi:

I. Pembuatan Kampung Tematik

Kampung tematik merupakan suatu inovasi dalam pengentasan permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar permukiman, terutama pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan prasarana permukiman. Pembuatan kampung tematik harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- 1) Mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh dan meningkatkan atau memperbaiki kondisi lingkungan
- 2) Peningkatan penghijauan wilayah secara intensif
- 3) Pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif, dan
- 4) Mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat

Konsep kampung tematik yang terdapat di kawasan prioritas RW 01 adalah **“Kampung Santren “**. Konsep Kampung Santren ini merupakan penguatan identitas Kelurahan Gading Kasri yang religius dan juga untuk memperkuat potensi adanya pondok pesantren di RW 01 Kelurahan Gading Kasri. Kampung Santren terletak di RT 02/ RW 01 dan RT 01/ RW 06 Kelurahan Gading Kasri.

II. Pemenuhan Fasilitas Dasar

Pemenuhan fasilitas dasar pada kawasan kumuh terdiri dari penataan bangunan, penanganan sanitasi, penanganan air minum, penataan saluran

drainase, penataan sistem persampahan, penataan jalan lingkungan dan penyediaan RTH publik.

1) Konsep Penataan Bangunan

Permasalahan yang sering terlihat di kawasan kumuh adalah ketidakteraturan bangunan. Permasalahan ketidakteraturan bangunan yang terdapat di kawasan kumuh Kelurahan Gading Kasri adalah bangunan ilegal yang terdapat di kawasan prioritas RW 01 dimana terdapat bangunan yang terletak di atas aliran sungai dan bangunan rumah yang mempersempit akses jalan lingkungan. Oleh sebab itu, konsep penataan bangunan di kawasan prioritas adalah dengan pembongkaran bangunan untuk pelebaran jalan dan pembongkaran bangunan yang terdapat di atas aliran sungai.

2) Konsep Penanganan Sanitasi

Sebagian besar penduduk di Kelurahan Gading Kasri yang berada di kawasan kumuh belum memiliki *septic tank*. Berdasarkan *database line* Kelurahan Gading Kasri tahun 2015, sekitar 7,75% penduduk di Kelurahan Gading Kasri masih belum memiliki *septic tank*. Hal tersebut berarti sekitar 7,75% penduduk Kelurahan Gading Kasri mengalirkan limbah MCK ke dalam saluran drainase. Seperti halnya penduduk di RW 01 (lokasi prioritas) yang masih membuang limbah MCK langsung ke sungai yang mengalir melintasi RW 01, RW 06, dan RW 04. Oleh sebab itu, di RW 01 direncanakan pembangunan biofill fabrikasi komunal di RT 02, RT 03, RT 04, RT

05, RT 06, RT 07, RT 08 dan RT 09 di RW 01. Selain akan melayani sanitasi warga di RW 01, keberadaan biofill fabrikasi komunal yang akan dibangun di RT 02/ RW 01 nantinya juga akan melayani warga RT 01/ RW 06 yang juga sebagian besarnya warganya masih membuang limbah MCK mereka langsung ke sungai.

3) Konsep Penanganan Air Minum

Berdasarkan *databaseline* Kelurahan Gading Kasri tahun 2015, sekitar 36% masyarakat di Kelurahan Gading Kasri masih menggunakan sumur sebagai sumber air. Oleh sebab itu, direncanakan adanya pemasangan saluran pipa PDAM untuk melayani masyarakat yang masih menggunakan sumur. Dengan beralihnya masyarakat ke PDAM, maka dapat melindungi kandungan air tanah yang saat ini sudah semakin menurun. Selain itu juga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat karena saat ini sebagian besar air dalam sumur masyarakat telah mengalami pencemaran. Seperti halnya sebanyak 46% penduduk di RW 01 (lokasi prioritas penanganan) yang masih menggunakan sumur sebagai sumber air bagi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, nantinya penduduk di RW 01 yang masih menggunakan sumur diarahkan untuk beralih menggunakan sumber air dari PDAM karena kualitas air yang lebih terjamin dari segi kesehatan.

4) Konsep Penataan Saluran Drainase

Genangan air ketika terjadi hujan juga menjadi masalah di beberapa kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri. Tinggi dan lama genangan sangat beragam tergantung pada intensitas dan lama waktu hujan. Rata-rata tinggi genangan air ketika terjadi hujan berkisar antara 30-100cm. Pada musim penghujan terdapat beberapa titik yang menjadi lokasi genangan banjir di Kelurahan Gading Kasri. Seperti halnya banjir yang terjadi di RW 03. Banjir di RW 03 tersebut bukan hanya berdampak pada penduduk sekitar, namun juga berdampak pada terhambatnya akses masyarakat pada Jl. Bendungan Sutami, Jl. Bondowoso dan Jl. Galunggung yang menjadi salah satu jalan utama di Kota Malang.

Banjir dan genangan air juga terjadi di RW 01 (lokasi prioritas). Titik lokasi banjir di RW 01 berada di sekitar kawasan RT 04 dan 05. Hal tersebut disebabkan karena adanya luapan air dari sungai tidak mampu menampung debit air ketika hujan. Hal tersebut juga semakin diperparah dengan adanya sedimentasi di saluran drainase sehingga genangan menjadi semakin parah.

Untuk mengatasi masalah genangan, maka dibutuhkan sistem drainase yang baik. Permasalahan drainase yang terjadi di kawasan prioritas meliputi sedimentasi saluran, penyempitan saluran dan belum adanya saluran. Oleh sebab itu, program penataan saluran drainase Kelurahan Gading Kasri terdiri dari:

- a. Normalisasi saluran drainase dengan pengerukan limbah yang menyumbat saluran.
- b. Pelebaran saluran untuk saluran yang mengalami penyempitan.
- c. Pembuatan saluran baru untuk permukiman yang belum memiliki saluran.

5) Konsep Penataan Sistem Persampahan

Penumpukan sampah juga menjadi salah satu masalah pada kawasan kumuh Kelurahan Gading Kasri. Penumpukan sampah seringkali terjadi karena adanya keterlambatan dari petugas pengangkut sampah yang bertugas mengangkut sampah dari setiap tong sampah di sekitar rumah masyarakat menuju TPS terdekat. Akibat keterlambatan petugas pengangkut sampah tersebut adalah penumpukan sampah di sekitar permukiman masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diadakan penambahan gerobak sampah dan petugas kebersihan. Penambahan gerobak sampah dan petugas kebersihan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sampah di kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri, terutama masalah terkait keterlambatan petugas pengangkutan sampah.

Selain itu, juga dilakukan pengadaan komposter yang berfungsi untuk meningkatkan pengolahan sampah organik. Dengan adanya komposter, sampah organik yang seringkali dibuang begitu saja,

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman masyarakat di prioritas. Selain itu, pupuk kompos dari hasil pengolahan sampah organik juga dapat dimanfaatkan untuk perawatan tanaman penduduk dan tanaman yang terdapat di taman atau *vertical garden*.

6) Konsep Penataan Jalan Lingkungan

Konsep penataan jalan lingkungan di kawasan kumuh Kelurahan Gading Kasri adalah dengan peningkatan kualitas perkerasan jalan lingkungan. Peningkatan kualitas jalan lingkungan dilakukan dengan perbaikan perkerasan jalan. Perkerasan jalan di kawasan kumuh sebagian besar berupa paving. Akan tetapi, kondisi paving tersebut sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Peningkatan perkerasan paving (pavingisasi) bertujuan untuk meningkatkan tingkat resapan air ke dalam tanah. Peningkatan resapan air ke dalam tanah dilakukan karena sebagian besar kondisi permukiman di kawasan kumuh memiliki area resapan yang sempit. Sehingga, dengan adanya pavingisasi, air tidak langsung melimpas melainkan meresap ke dalam tanah. Selain paving, peningkatan perkerasan jalan juga berupa rabat ampyang untuk jalan yang berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan paving. Seperti halnya pada kawasan prioritas RW 01 dimana terdapat jalan di RT 09/ RW 01 yang tidak dapat dilakukan pemasangan paving. Hal tersebut dikarenakan jalan berada di atas saluran drainase sehingga apabila dilakukan pemasangan paving hanya akan menambah beban bagi

jalan yang juga berfungsi sebagai tutup saluran. Sehingga peningkatan perkerasan di jalan tersebut berupa rabat ampyang.

7) Penyediaan RTH Publik

Untuk menunjang kegiatan rekreasi masyarakat, maka direncanakan pembangunan Taman dan *vertical garden* pada kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri. Sebagai kawasan padat penduduk, keberadaan taman memang sangat dibutuhkan oleh penduduk yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Selain dapat digunakan sebagai tempat rekreasi, keberadaan taman juga dapat mengubah wajah suatu kawasan menjadi lebih indah dan nyaman. Rasa nyaman yang ditimbulkan dengan adanya taman akan berpengaruh pada kondisi sosial penduduk.

Pada lokasi prioritas di RW 01, pembuatan taman direncanakan di RT 05, RT 08, dan RT 09 RW 01. Sedangkan *vertical garden* direncanakan menyebar di seluruh RT di RW 01. Pembangunan taman dilakukan karena adanya potensi lahan yang cukup luas yang dapat dimanfaatkan sebagai taman. Pembangunan taman bukan hanya bertujuan untuk menunjang kegiatan rekreasi masyarakat, akan tetapi juga untuk area resapan air. Penyediaan fasilitas taman juga disesuaikan dengan konsep bebas limbah. Untuk mendukung konsep tersebut, maka fasilitas yang dibutuhkan antara lain, komposter untuk mengolah sampah organik, biopori untuk meningkatkan resapan air dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang

Dalam pelaksanaan program KOTAKU dalam upaya penanganan kawasan kumuh pada BKM Kelurahan Gading Kasri terdapat faktor penghambat sebagai berikut:

1. Gambaran tentang kondisi bangunan hunian tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik namun juga kondisi non fisik seperti legalitas bangunan hunian. Dalam hal ini, aspek legalitas terkait dengan bangunan hunian harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebagai dasar pelaksanaan konstruksi bangunan serta harus memiliki SHM/HGB/surat yang diakui oleh pemerintah terutama terkait dengan kepemilikan lahan. Permasalahan terkait dengan legalitas bangunan dan hunian banyak terjadi pada kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan dari banyak bangunan yang tidak dilengkapi IMB dan surat kepemilikan tanah secara memadai.

Di Kelurahan Gading Kasri yang sudah dilengkapi dengan IMB rata-rata sebesar 96%. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepemilikan IMB yakni banyaknya rumah/bangunan hunian yang didirikan sebelum adanya perda IMB serta masyarakat masih belum menaruh perhatian yang besar terhadap kepentingan adanya IMB.

Lebih lanjut, proporsi bangunan hunian yang sudah memiliki IMB paling besar terdapat di RW 03, RW 05, dan RW 06 yakni masing-masing mencapai 100% dengan jumlah bangunan hunian sebanyak 641 unit (RW 03), 205 unit (RW 05) dan 89 unit (RW 06). Sedangkan proporsi kepemilikan IMB terkecil terdapat di RW 04 yang hanya 12% atau sekitar 68 unit rumah.

2. Rumah tangga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang terdapat di suatu wilayah juga akan mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut, terutama terkait pengentasan kekumuhan. Sebab, sebagian besar rumah tangga MBR bermukim di kawasan kumuh. Selain itu, perbandingan atau selisih jumlah rumah tangga MBR dan non-MBR di suatu wilayah akan mempengaruhi proses pembangunan di wilayah tersebut.

Kelurahan Gading Kasri yang berada di pusat Kota Malang, menjadikan penduduk di Kelurahan Gading Kasri cenderung heterogen. Heterogenitas penduduk salah satunya dapat ditinjau dari tingkat ekonomi. Jumlah rumah tangga MBR tertinggi berada di RW 02. Jumlah rumah tangga MBR yang terdapat di RW 02 berjumlah 172 rumah tangga. Tingginya jumlah rumah tangga MBR di suatu kawasan menunjukkan cenderung rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di kawasan tersebut.

Berbagai macam jenis usaha ekonomi juga membantu mengurangi jumlah MBR. Banyaknya usaha ekonomi di Kelurahan

Gading Kasri seharusnya dapat menjadi potensi bagi penyerapan tenaga kerja lokal bagi penduduk sekitar. Akan tetapi, tingginya potensi jenis usaha ekonomi tersebut ternyata belum bisa mengentaskan masalah pengangguran di Kelurahan Gading Kasri. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya tenaga kerja yang kurang terampil, maka dari itu banyak lokasi usaha yang menggunakan tenaga kerja dari luar wilayah Gading Kasri.

3. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program pemerintah yang berbasis masyarakat. Dimana dalam program KOTAKU ini dibutuhkan peran aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan juga perawatannya. Namun masih banyak masyarakat yang melemparkan tanggungjawab pembangunan infrastruktur permukiman kepada pemerintah. Sehingga masih kurang kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar.

C. Analisis Data

1. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang.

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program. Jadi seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil-hasil program terhadap tujuan-tujuan kebijakan, bahwa proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan ide-ide umum telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah di desain dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Hal ini menjadi kondisi dasar yang jelas untuk implementasi kebijakan dan program-program dijalankan.

Implementasi kebijakan umumnya memiliki 4 fase (Nugroho, 2014:246) yaitu :

- Sosialisasi
- Implementasi
- Kontrol Implementasi
- Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan

pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019, adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat. Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku). Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, Penguatan Peran Pemda sebagai Nahkoda dan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota.

a. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU

Hubungan komunikasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan program. Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan informasi oleh kelompok sasaran sehingga kualitas tasi kebijakan publik. Winarno (2005:129) menyebutkan bahwa semakin banyak aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi. Dengan demikian maka penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan

mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.

Widodo (2007:97) menyebutkan bahwa komunikasi memiliki beberapa macam dimensi yaitu :

1. Transmisi (*transmission*)

Dimensi transmisi menghendaki supaya proses penyaluran komunikasi kebijakan publik berjalan baik sehingga akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Dimensi transmisi mengharapkan agar tidak terjadi adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Karena informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan melainkan juga kepada kelompok sasaran kebijakan, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan baik langsung maupun tidak langsung.

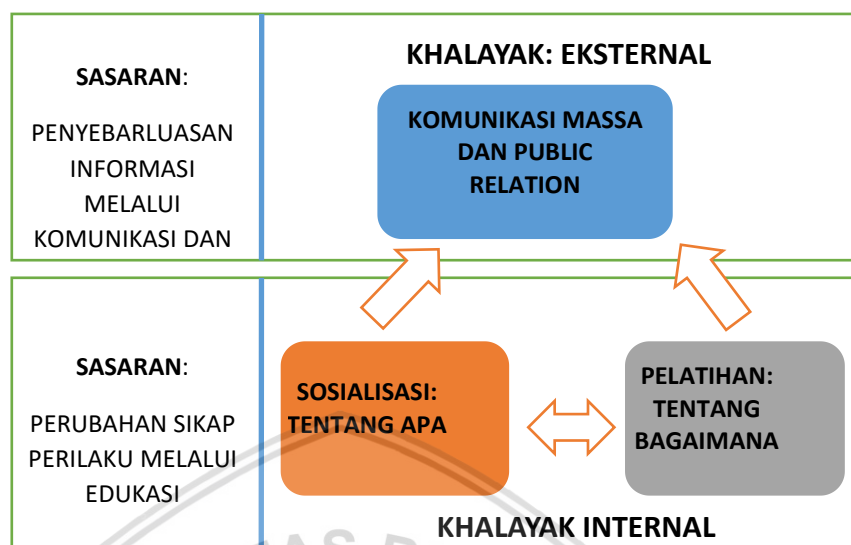
Dilihat dari dimensi transmisi proses penyaluran komunikasi program di BKM berjalan dengan baik karena komunikasi berjalan secara dua arah. Untuk setiap program yang dijalankan telah dikoordinasikan dengan baik kepada masing-masing pelaksana program dan terdapat tupoksi dalam melaksanakannya. BKM juga melakukan review program tiap tahunnya yang disusun dalam buku rembug warga tahunan. Tujuan dari review program adalah untuk merumuskan program BKM yang lebih baik sebagai bagian dari

peningkatan kualitas permukiman bagi kawasan kumuh di Kelurahan Gading Kasri.

2. Kejelasan (*clarity*)

Dimensi kejelasan menginginkan agar komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan (ambigu). Kebijakan ditransmisikan kepada para pelaksana kebijakan, target grup dan pihak yang berkepentingan dengan jelas karena kejelasan informasi akan memberikan pemahaman kepada seluruh aktor implementator untuk mengetahui apa yang seharusnya dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan agar tujuan dari implementasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dilihat dari dimensi kejelasan program yang dijalankan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri telah menghasilkan komunikasi yang baik antara aktor internal dan juga eksternal. Bukan hanya komunikasi yang dilakukan dalam lingkup organisasi tetapi juga komunikasi pada KSM aktif yang ada di masing-masing kawasan prioritas. Juga dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.



Gambar 4.5 Strategi Komunikasi Program KOTAKU

Dalam hal ini BKM dan fasilitator terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Menentukan pemetaan swadaya dengan cara turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi lingkungan. Setelah itu masyarakat juga diikut sertakan dalam penyusunan profil kumuh yang akan dibuatkan dokumen perencanaan (DED) oleh BKM Gading Kasri. Dokumen perencanaan dikirimkan ke pusat untuk mengetahui program-program mana saja yang bisa dilaksanakan dan juga untuk pencairan dana program KOTAKU yang akan di terima langsung oleh BKM. Pada pelaksanaannya, masyarakat juga ikut serta ikut dalam pengawasan dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh program BKM.

- b. **Penyusunan profil permukiman kumuh kelurahan berdasarkan indikator kumuh Program Kota Tanpa Kumuh**

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:

4. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
5. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
6. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - i. Keteraturan bangunan
 - j. Jalan Lingkungan
 - k. Drainase Lingkungan
 - l. Penyediaan Air Bersih/Minum
 - m. Pengelolaan Persampahan
 - n. Pengelolaan Air Limbah
 - o. Pengamanan Kebakaran, dan
 - p. Ruang Terbuka Publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

◆ Isi Kebijakan (Content of Policy)

a. Interest Affected (Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Dapat dilihat bahwa program ini dirancang untuk kepentingan masyarakat. Direncanakan oleh masyarakat, penyusunan dokumen oleh masyarakat, pelaksanaan oleh masyarakat dan juga manfaat yang diterima untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat itu sendiri. Walaupun persetujuan dan juga pendanaan tetap dari pemerintah pusat.

b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Terlihat dalam proses penyusunan profil permukiman bahwa masih terdapat banyak masalah yang

termasuk dalam indikator permukiman kumuh. Maka dari itu disusunlah program pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat setempat.

c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Pada dasarnya banyak sekali permasalahan yang terjadi karna rendahnya kualitas lingkungan. Maka dari itu dengan adanya program KOTAKU ini dapat memberikan dampak positif baik secara fisik maupun non fisik. Dampak fisik seperti, adanya biofill fabrikasi komunal agar masyarakat tidak lagi membuang limbah masyarakat pada aliran sungai. Adanya pemanfaatan RTH, dimana pada saat ini banyak sekali bangunan rumah baru dikarenakan semakin padatnya penduduk perkotaan membuat semakin sempitnya lahan terbuka hijau yang ada. Sehingga sedikit lahan kosong walaupun sangat berpengaruh terhadap peningkatan RTH yang ada di perkotaan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dampak positif secara non fisik yaitu perubahan mindset masyarakat untuk ikut menjaga lingkungannya untuk senantiasa bersih dan layak untuk dihuni.

d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Karena program ini perencanaannya berada di masyarakat dengan melihat langsung kondisi sosial di lingkungan tersebut, maka secara tidak langsung program ini sedikit banyak telah mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan BKM sebagai perantara pembuatan RPLP dokumen perencanaan yang akan diterima oleh pemerintah pusat sebagai pemberi anggaran.

e. Program Implementer (Pelaksana Program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Semua aktor yang terlibat dalam program ini seperti fasilitator dan anggota BKM serta KSM telah menerima sosialisasi dan juga pelatihan sebelumnya.

f. Resources Committed (Sumber-Sumber Daya yang Digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Ada beberapa sumberdaya yang harus ada dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, seperti sumberdaya manusia dan

sumberdaya pendaan. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam program ini semua berasal dari masyarakat itu sendiri. Bahkan anggota BKM juga termasuk dalam masyarakat yang nantinya akan merasakan hasil dari program KOTAKU ini. Sementara sumberdaya pendanaan berasal dari pemerintah pusat karena ini termasuk program pemerintah pusat.

◆ Lingkungan Implementasi (Context of Implementation):

- a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Seperti yang tercantum dalam tujuan program KOTAKU ini adalah ersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh

- b. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. BKM adalah organisasi

yang mensinergikan segenap potensi masyarakat agar mampu mandiri dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah di wilayah kelurahannya. Tugas dari BKM yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan tujuan tercapainya pengentasan permukiman kumuh wilayah Gading Kasri.

c. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Merubah mindset masyarakat memang tidak mudah dimana harus merubah kebiasaan menjadi masyarakat yang peduli terhadap kualitas lingkungan. Tetapi secara bersama-sama bekerja sama untuk mendapat lingkungan lebih baik terasa lebih mudah.

c.Konsep dan strategi yang digunakan dalam Penanganan Kawasan Kumuh

Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja penanganan kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada

Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Pencegahan

Tindakan pencegahan kumuh meliputi pengelolaan dan pemeliharaan kualitas perumahan dan permukiman, serta dengan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru.

2. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali

3. Pengelolaan

- a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
- b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
- c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
- d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh terdapat 3 pendekatan (Setijanti dalam Butar, 2012), yakni:

- 4) Pendekatan partisipatori, yang mampu mengeksplorasi masukan dari komunitas, khususnya kelompok sasaran, yang memfokuskan pada permintaan lokal, perubahan perilaku dan yang mampu mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk melaksanakan operasional dan pemeliharaannya. Strategi operasional dari program ini adalah menerapkan perencanaan partisipatif multi-aktor. Dimana aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU adalah dari pemerintah pusat sampai dengan masyarakat sebagai perencana, pelaksana, pemelihara dan sekaligus sebagai penerima manfaat dari program ini.
- 5) Pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan menaruh perhatian utama pada pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Sebagaimana yang terkandung dalam amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik, sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. ayat tersebut menjelaskan bahwa tinggal di sebuah hunian dengan

lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin. Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2015-2019 adalah strategi pembangunan infrastruktur di perkotaan yang dilakukan melalui pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

- 6) Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang, pendekatan ini pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh merupakan bagian dari rencana umum tata ruang kota dan merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota secara integral. Maka dari itu BKM sebagai lembaga di wilayah Kelurahan dan paling dekat dengan masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah pusat untuk mewujudkan program KOTAKU dengan baseline 100-0-100 yaitu 100% akses air bersih, 0% kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang

Dalam pelaksanaan program KOTAKU dalam upaya penanganan kawasan kumuh pada BKM Kelurahan Gading Kasri terdapat faktor penghambat sebagai berikut:

1. Gambaran tentang kondisi bangunan hunian tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik namun juga kondisi non fisik seperti legalitas bangunan hunian. Dalam hal ini, aspek legalitas terkait dengan bangunan hunian harus memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebagai dasar pelaksanaan konstruksi bangunan serta harus memiliki SHM/HGB/surat yang diakui oleh pemerintah terutama terkait dengan kepemilikan lahan. Permasalahan terkait dengan legalitas bangunan dan hunian banyak terjadi pada kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan dari banyak bangunan yang tidak dilengkapi IMB dan surat kepemilikan tanah secara memadai.

Di Kelurahan Gading Kasri yang sudah dilengkapi dengan IMB rata-rata sebesar 96%. Salah satu faktor penyebab rendahnya kepemilikan IMB yakni banyaknya rumah/bangunan hunian yang didirikan sebelum adanya perda IMB serta masyarakat masih belum menaruh perhatian yang besar terhadap kepentingan adanya IMB. Lebih lanjut, proporsi bangunan hunian yang sudah memiliki IMB

paling besar terdapat di RW 03, RW 05, dan RW 06 yakni masing-masing mencapai 100% dengan jumlah bangunan hunian sebanyak 641 unit (RW 03), 205 unit (RW 05) dan 89 unit (RW 06). Sedangkan proporsi kepemilikan IMB terkecil terdapat di RW 04 yang hanya 12% atau sekitar 68 unit rumah.

2. Rumah tangga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang terdapat di suatu wilayah juga akan mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut, terutama terkait pengentasan kekumuhan. Sebab, sebagian besar rumah tangga MBR bermukim di kawasan kumuh. Selain itu, perbandingan atau selisih jumlah rumah tangga MBR dan non-MBR di suatu wilayah akan mempengaruhi proses pembangunan di wilayah tersebut.

Kelurahan Gading Kasri yang berada di pusat Kota Malang, menjadikan penduduk di Kelurahan Gading Kasri cenderung heterogen. Heterogenitas penduduk salah satunya dapat ditinjau dari tingkat ekonomi. Jumlah rumah tangga MBR tertinggi berada di RW 02. Jumlah rumah tangga MBR yang terdapat di RW 02 berjumlah 172 rumah tangga. Tingginya jumlah rumah tangga MBR di suatu kawasan menunjukkan cenderung rendahnya tingkat perekonomian masyarakat di kawasan tersebut.

Berbagai macam jenis usaha ekonomi juga membantu mengurangi jumlah MBR. Banyaknya usaha ekonomi di Kelurahan Gading Kasri seharusnya dapat menjadi potensi bagi penyerapan

tenaga kerja lokal bagi penduduk sekitar. Akan tetapi, tingginya potensi jenis usaha ekonomi tersebut ternyata belum bisa mengentaskan masalah pengangguran di Kelurahan Gading Kasri. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya tenaga kerja yang kurang terampil, maka dari itu banyak lokasi usaha yang menggunakan tenaga kerja dari luar wilayah Gading Kasri.

3. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program pemerintah yang berbasis masyarakat. Dimana dalam program KOTAKU ini dibutuhkan peran aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan juga perawatannya. Namun masih banyak masyarakat yang melemparkan tanggungjawab pembangunan infrastruktur permukiman kepada pemerintah. Sehingga masih kurang kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar.

Dari poin-poin faktor penghambat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kebijakan publik, keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) mempunyai andil dalam kebijakan. Mereka merupakan aktor yang dapat mempengaruhi apakah kebijakan yang telah dilaksanakan akan berhasil atau tidak. Pelaku kebijakan tersebut salah satunya adalah masyarakat itu sendiri. Apabila keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari tidak mendukung program yang ada maka akan mempengaruhi hasil dari program tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Program KOTAKU dalam upaya penanganan kawasan kumuh di BKM Kelurahan Gading Kasri maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari dimensi kejelasan program yang dijalankan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Gading Kasri telah menghasilkan komunikasi yang baik antara aktor internal dan juga eksternal. Bukan hanya komunikasi yang dilakukan dalam lingkup organisasi tetapi juga komunikasi pada KSM aktif yang ada di masing-masing kawasan prioritas. BKM dan fasilitator terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang strategi dan konsep dari program KOTAKU ini. Serta tujuan Program KOTAKU dirancang dengan Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan dan kolaborasi sebagai *platform* serta masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh. BKM juga melaksanakan rapat koordinasi setiap bulannya untuk merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan selanjutnya. Setiap awal tahun juga dilaksanakan review program yang dirangkum dalam rembug warga tahunan.

2. Penyusunan profil permukiman kumuh kelurahan juga sudah dilaksanakan berdasarkan indikator kumuh. Pada dasarnya banyak sekali permasalahan yang terjadi karena rendahnya kualitas lingkungan di Kelurahan Gading Kasri. Seperti lahan mendirikan rumah yang belum memiliki IMB, masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah, masih banyaknya rumah warga yang belum mempunyai *septic tank*, semakin meningkatnya jumlah penduduk sehingga sempitnya ruang terbuka hijau, dan juga mainset masyarakat yang masih menggantungkan bantuan dari pemerintah.
3. Program KOTAKU bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman kumuh perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. BKM Gading Kasri juga telah melaksanakan beberapa kegiatan, khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan baik fisik, sosial maupun ekonomi. Dengan adanya program KOTAKU yang dilaksanakan di BKM Kelurahan Gading Kasri ini dapat memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Seperti dilaksanakannya rehabilitasi rumah yang mengalami kerusakan secara fisik, pengadaan sarana dan prasarana yang bekerja sama dengan PDAM, pembangunan biofill fabrikasi komunal (IPAL), pelebaran saluran drainase, pengadaan alat komposter untuk pemanfaatan sampah organik, perbaikan jalan yang rusak dengan cara pavingisasi, penyediaan APAR,

dan juga pembangunan taman vertikal yang bekerjasama dengan dinas terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran :

1. Sebaiknya diadakan pertemuan untuk memperbanyak pemberian informasi mengenai program KOTAKU yang dilakukan oleh BKM, KSM dan masyarakat sekitar yang menerima manfaat program. Agar terjalin komunikasi yang lebih baik dan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di lingkungan sekitar. Merubah mindset masyarakat juga bukanlah hal yang mudah karena mindset masyarakat yang masih menggantungkan bantuan dari pemerintah. Diharapkan dengan seringnya diadakan sosialisasi dan pertemuan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari kondisi permukiman yang kumuh..
2. Perlu diadakannya pelatihan kewirausahaan untuk memperbaiki perekonomian warga sekitar. Seperti pelatihan pengolahan sampah organik, daur ulang sampah yang masih bisa menjadi sumber penghasilan, pelatihan untuk pembuatan vertikal garden dengan alat dan bahan yang sederhana. Dan juga harapan untuk dapat memperindah lingkungan menjadi lebih nyaman untuk dihuni.

3. Perlu adanya *reward* bagi kawasan yang senantiasa bersih dan kreatif.

Agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam terus menjaga lingkungannya terhindar dari indikator permukiman kumuh dan dapat memotivasi masyarakat untuk menjadi kampung percontohan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 1998. *Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kota Malang dalam angka tahun 2015*. Malang
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik Daerah Kecamatan Klojen 2015*. Malang
- Butar Butar, Debora, Catherine. 2012. Peneataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi. *Jurnal Teknik POMTIS* Vol. 1 No 1.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2015. *Sosnas Profil KOTAKU*.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2007. *Buku Panduan Pengembangan Permukiman: Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya*. Jakarta
- Islamy, Irfan. Prof, 2007. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Jakarta: Rakasindo.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2015. *Prosedur Operasional Baku (POB) : Penyusunan Baseline Data 100-0-100*. Jakarta
- Kurniawan, Kufi. 2011. *Alternatif Penataan Permukiman Kumuh Kota Malang Perspektif Stakeholder*. Skripsi Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Miles, M.B, Huberman A.M, Saldana, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book*. Sage Publication.
- Moleong, Lexy. J. (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Kota Malang. 2015. *Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Malang*. Surabaya : Kementrian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Pemerintah Kota Malang. 2015. *Keputusan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Malang*. Malang

- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Pemerintah Kota Malang. 2015. *Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Malang*. Surabaya: Kementrian Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Timur.
- Pemerintah Kota Malang. 2015. *Keputusan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Malang*. Malang
- Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No.7. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lembar Negara RI Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sadyohutomo. 2008. *Manajemen Kota da Wilayah Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.
- Tahjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: RTH.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wahab, Solichin. Abdul, 2014. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yunus, Hadi Sabari. 2005. *Manajemen Kota : Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Vian Frisca Aisyahwati

NIM : 115030107111003

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 23 Agustus 1993

Email : Friscaviian@gmail.com

Pendidikan : 1) SDN Percobaan II Malang, Tamat Tahun 2005

2) SMP Negeri 13 Malang, Tamat Tahun 2008

3) SMK Negeri 4 Malang, Tamat Tahun 2011

Publikasi atau Karya Ilmiah : Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh (Studi pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang)



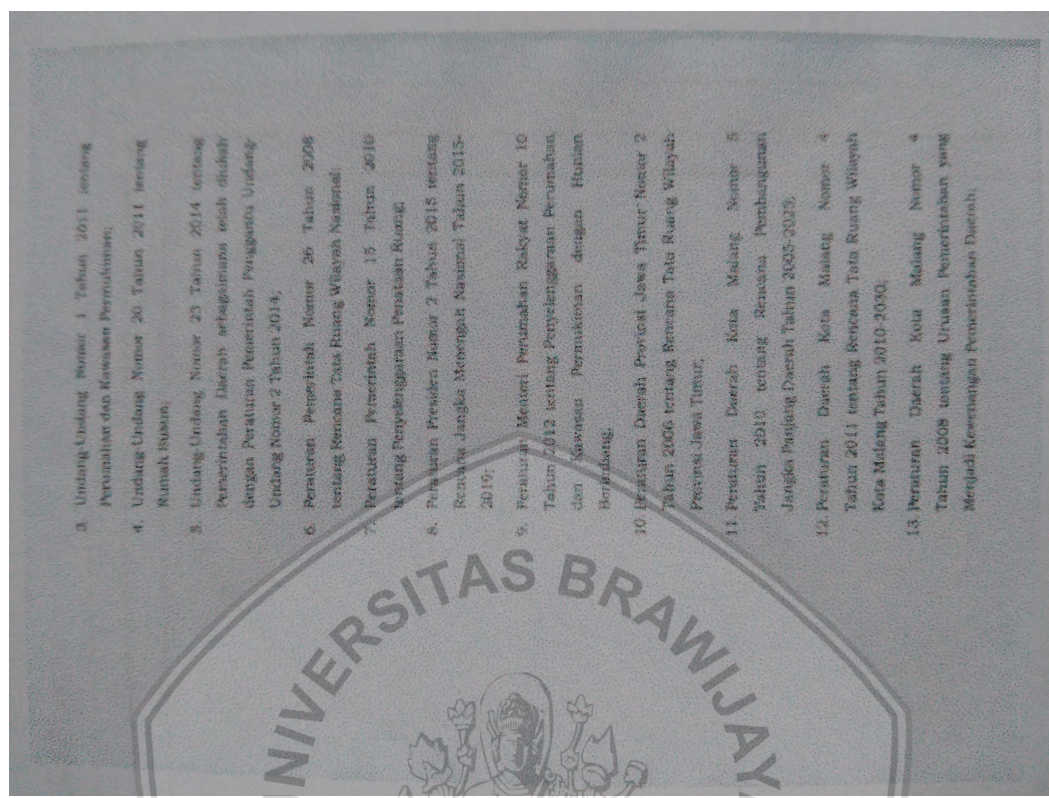
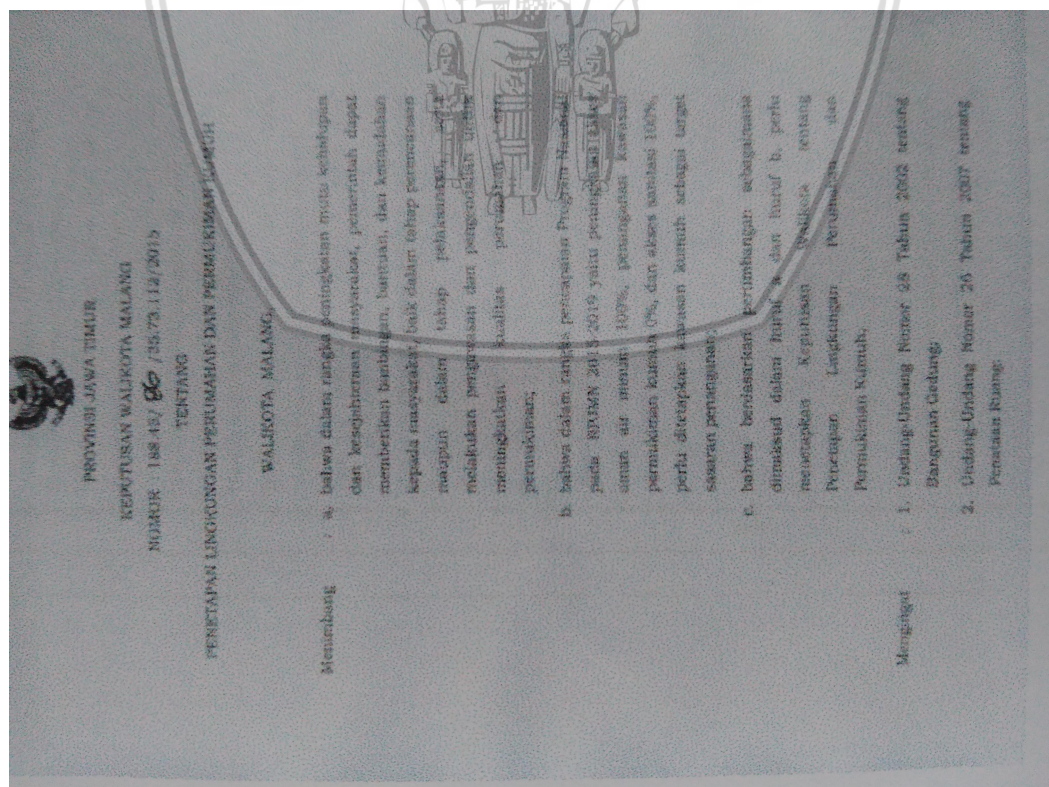
PEDOMAN WAWANCARA

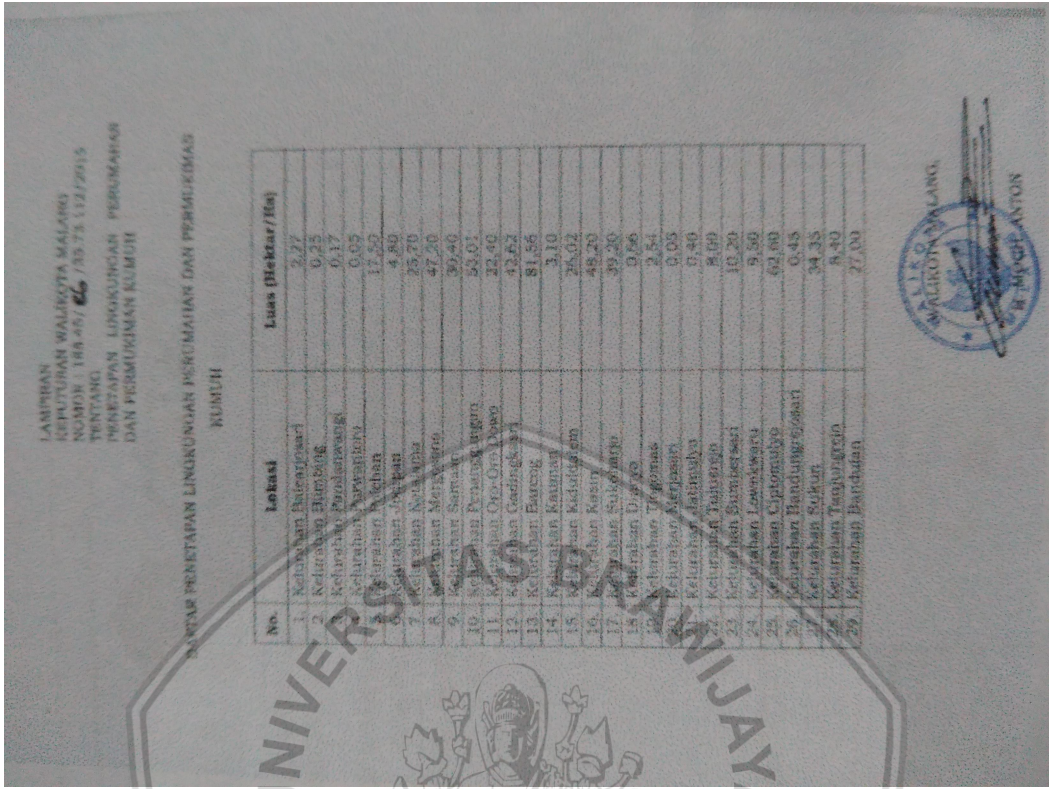
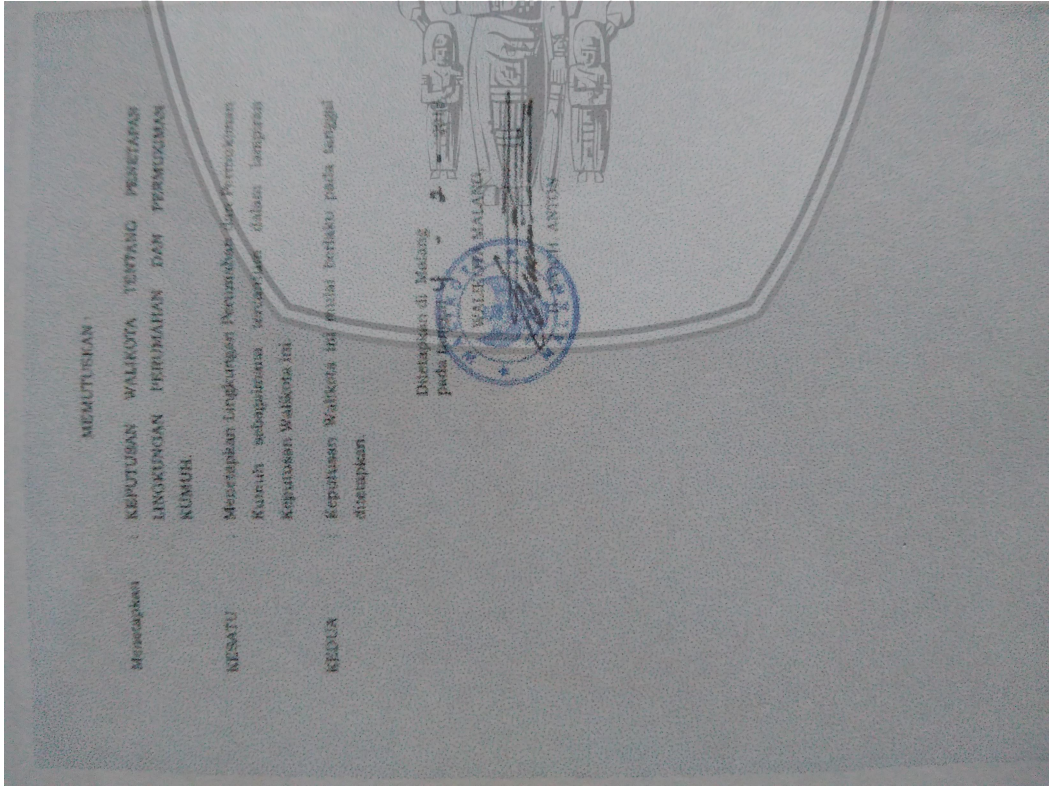
A. Pada Badan Keswadayaan Masyarakat

1. Apa yang dimaksud dengan program Kota Tanpa Kumuh?
2. Daerah mana saja yang mendapatkan kebijakan dari program ini? Kenapa?
3. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BKM ini dalam melaksanakan program KOTAKU?
4. Bagaimana proses pelaksanaan program kotaku di daerah ini?
5. Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program? Dan struktur organisasinya?
6. Darimana dana yang didapatkan untuk pelaksanaan program ini?
7. Kondisi apa saja yang sering dijumpai di lapangan?
8. Bagaimana hubungan antara program, organisasi pelaksana dan penerima manfaat dari program KOTAKU ini?
9. Apakah sudah memenuhi target dalam 2 ½ tahun sejak dibentuknya kebijakan ini?
10. Bagaimana kontribusi yang diberikan masyarakat dalam pelaksanaan program ini?
11. Kendala atau kesulitan apa saja yang biasa terjadi?
12. Apakah ada pembinaan khusus terhadap para fasilitator dan actor pelaksana program ini?
13. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada dalam implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh melalui program kotaku ini?

B. Pada Kelurahan Gadingkasri Kota Malang

1. Apa yang dimaksud dengan program Kota Tanpa Kumuh?
2. Daerah mana saja yang mendapatkan kebijakan dari program ini? Kenapa?
3. Apa peran kelurahan/kecamatan di dalam pelaksanaan Program KOTAKU?





[illegible]

Peta 3. 17 Keterangan dan Kepadatan Bangunan

